



BUKU II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah **Kota Magelang** **2022**



DAFTAR ISI

A.	Capaian Indikator Sasaran sampai dengan tahun 2020 untuk RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	1
B.	Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan tahun 2020 RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	5
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	6
1.1	Urusan Pendidikan	6
1.2	Urusan Kesehatan.....	11
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	23
1.6	Urusan Sosial	29
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	31
2.1	Urusan Ketenagakerjaan.....	31
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	33
2.3	Urusan Ketahanan Pangan	35
2.4	Pertanahan.....	38
2.5	Lingkungan Hidup	39
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	45
2.9	Perhubungan	48
2.10	Komunikasi dan Informatika	51
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53
2.12	Penanaman Modal	55
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	55
2.14	Statistik.....	57
2.15	Persandian	58
2.16	Kebudayaan	58
2.17	Perpustakaan	59
2.18	Kearsipan	60
3	Urusan Pilihan	62
3.1	Kelautan dan Perikanan	62
3.2	Pertanian	65
3.3	Energi dan Sumber Daya Mineral	68
3.4	Perdagangan.....	69
3.5	Perindustrian	70
3.6	Transmigrasi.....	72
4	Urusan Penunjang.....	72
4.1	Fungsi Lain-lain	72
4.2	Keuangan	74

4.3	Perencanaan Pembangunan	79
4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	80
4.5	Penelitian dan Pengembangan	82
4.6	Pengawasan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan teknologi informasi	9
Gambar 2-1	Kinerja Indikator Volume Sampah yang dibuang ke TPSA dari tahun 2015-2020	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021	1
Tabel 1-1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016 - 2020	6
Tabel 1-2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 - 2020	11
Tabel 1-3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020	15
Tabel 1-4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 - 2020	18
Tabel 1-5	Data Rumah penerima bantuan Rehab Rumah dari CSR Bank Pembangunan Jawa Tengah	22
Tabel 1-6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 -2020.....	23
Tabel 1-7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020	29
Tabel 2-1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2020.....	31
Tabel 2-2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020	33
Tabel 2-3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016 - 2020	35
Tabel 2-4	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Penduduk Kota Magelang Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 2-5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016 - 2020	38
Tabel 2-6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 -2020	43
Tabel 2-7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020	44
Tabel 2-8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020	45
Tabel 2-9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020.....	48
Tabel 2-10	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020.....	51
Tabel 2-11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020	53
Tabel 2-12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 - 2020	55
Tabel 2-13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020.....	55
Tabel 2-14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016 -2020	57
Tabel 2-15	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016 - 2020.....	58
Tabel 2-16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016 - 2020.....	58
Tabel 2-17	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016 - 2020.....	60

Tabel 2-18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020	60
Tabel 3-1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2020.....	62
Tabel 3-2	Jumlah Ketersediaan Produksi Ikan dan Konsumsi Ikan Penduduk Kota Magelang Tahun 2016-2020	63
Tabel 3-3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016 – 2020.....	65
Tabel 3-4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2020.....	68
Tabel 3-5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020.....	69
Tabel 3-6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016 -2020.....	70
Tabel 3-7	Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2016 - 2020	72
Tabel 4-1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi Lain Tahun 2020	72
Tabel 4-3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020.....	80
Tabel 4-4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020	82
Tabel 4-5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2020	84
Tabel 4-6	Capaian Indikator Kinerja Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP Tahun 2018-2020	86

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Sasaran sampai dengan tahun 2020 untuk RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Indikator sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 terdiri dari 83 indikator. Kondisi pencapaian indikator tersebut tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
Misi 1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Tujuan	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas							
Sasaran 1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur							
1	Persentase pegawai berkinerja baik	98,06%	82,63%	83,52%	84,52%	99,92%	97,90%	HIJAU
2	Capaian SPM Kota Magelang	66,67%	86,09%	80,00%	75,86%	72,41%	80,00%	HIJAU
3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	45,00%	47,00%	53,29%	53,29%	67,24%	67,00%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi							
1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	HIJAU
2	Indeks EKPPD	3,056	3,215	3,200	3,360	3,360	3,130	HIJAU
3	Hasil implementasi SAKIP	55,78	55,78	60,05	65,10	66,47	59,00	HIJAU
4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	30,00%	65,08%	63,97%	68,14%	79,12%	75,00%	HIJAU
5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	139,00%	100,00%	HIJAU
Tujuan 2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi							
Sasaran 1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive							
1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	97,50%	48,28%	62,07%	82,00%	82,81%	84,84%	HIJAU
Sasaran 2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik							
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	HIJAU
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	71,74%	100,00%	100,00%	80,56%	100,00%	90,00%	HIJAU
Sasaran 3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel							
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89,16%	93,98%	74,70%	72,29%	59,04%	98,00%	MERAH
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100,00%	90,99%	97,81%	99,71%	96,25%	90%	HIJAU

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
Tujuan 3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan							
Sasaran	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah							
1	Derajat Otonomi Fiskal	35,55%	34,80%	37,96%	39,40%	26,56%	33,88%	KUNING
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	67,57%	61,18%	62,82%	59,32%	67,01%	65,79%	HIJAU
Tujuan 4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat							
Sasaran 1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan							
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00%	70,19%	80,00%	81,48%	80,34%	68,00%	HIJAU
2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	51,72%	58,62%	65,52%	65,52%	86,21%	82,76%	HIJAU
3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	15,63%	8,82%	35,14%	22,00%	17,21%	5,45%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							
1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45,04%	87,24%	74,06%	74,06%	74,06%	49%	HIJAU
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional							
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional	6	6	21	21	8	6	HIJAU
2	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional	-	-	-	-	47	2	HIJAU
3	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah internasional	-	-	1	1	2	-	HIJAU
4	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional	10	125	37	37	-	10	MERAH
5	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat nasional	5	19	12	12	2	5	MERAH
6	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat internasional	2	19	1	1	2	2	HIJAU
Misi 2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan							
Tujuan 1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia							
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing							
1	Rata-rata lama sekolah	10,29	9,14	10,29	10,29	10,39	10,55	HIJAU
2	Persentase sekolah berstandar nasional (SD)	98,66%	41,33%	54,14%	57,14%	57,33%	55,66%	HIJAU
3	Persentase sekolah berstandar nasional (SMP)	90,00%	72,73%	78,26%	78,26%	82,61%	85%	HIJAU
4	Angka Melek Huruf	97,35%	98,57%	98,77%	98,77%	98,77%	98,63%	HIJAU
5	Persentase kunjungan perpustakaan	80,65%	81,10%	84,85%	88,06%	20,02%	77,07%	MERAH
6	Jumlah kunjungan perpustakaan	106.674	107.260	112.230	116.467	26.483	102.230	MERAH
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat							
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	15,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	HIJAU
2	Angka Harapan Hidup	76,62	76,66	76,72	76,75	76,85	76,85	HIJAU
3	AKI/ 100.000 KH	0	192,43	130,98	130,55	138,79	95,00	MERAH

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
4	AKB/ 1.000 KH	10,66	12,19	13,10	10,44	13,88	13,00	HIJAU
5	AKABA	0,127	0,141	0,151	0,1175	0,1666	0,140	KUNING
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,22	0,308	0,24	0,19	0,69	0,31	MERAH
7	Angka Kesakitan DBD	72,03	49,66	40,00	58,33	17,97	50,00	HIJAU
8	Angka Prevalensi Kasus TB	122,54	153,49	154,61	174,23	195,28	102,00	MERAH
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,02%	0,03%	0,02%	0,01%	0,03%	0,05%	HIJAU
10	Persentase Rumah Tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	97,25%	95,96%	97,99%	99,15%	98,61%	98%	HIJAU
Sasaran 3 Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah								
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0,00%	16,85%	MERAH
Sasaran 4 Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern								
1	Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	60,00%	50,00%	HIJAU
2	Persentase sarana prasarana penyedia layanan kesehatan menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	0,00%	10,00%	50,00%	98,67%	50,00%	40,00%	HIJAU
3	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	20,00%	20,00%	60,00%	60,00%	40,00%	60%	KUNING
Tujuan 2 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju <i>smart environment</i> .								
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup								
1	Indeks Pencemaran Air	36,25	46,47	52,00	52,00	10,00	76,79	MERAH
2	Indeks Pencemaran Udara	41,76	85,67	84,91	84,91	87,69	77,90	HIJAU
3	Indeks Tutupan Vegetasi	54,03	57,24	38,22	38,22	38,22	49,31	KUNING
4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m³)	160,58	249,66	287,70	287,70	416,05	151,70	MERAH
Sasaran 2 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau								
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau: Privat	19,11%	19,11%	19,10%	19,10%	19,10%	10,00%	HIJAU
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau: Publik	19,61%	19,60%	19,62%	19,62%	19,62%	18,46%	HIJAU
Sasaran 3 Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana								
1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	3,98%	4,92%	7,27%	7,38%	7,70%	15,08%	MERAH
2	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	0,00%	5,88%	11,76%	23,53%	23,53%	23,53%	HIJAU
Sasaran 4 Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang								
1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	23,00%	24,00%	24,14%	25,48%	26,12%	27,00%	HIJAU
Misi 3 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat								
Tujuan 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas								
Sasaran 1 Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan								
1	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik	79,00%	82,62%	85,34%	85,13%	85,75%	85,00%	HIJAU
Sasaran 2 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat								

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	100,00%	80,00%	70%	6,42%	10,50%	HIJAU
2	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang terlayani air minum	87,60%	87,88%	93,78%	94,64%	96,61%	100%	HIJAU
3	Luas kawasan kumuh (Ha)	24,40	67,40	37,16	18,68	10,778	0%	HIJAU
4	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7,00%	3,73%	3,01%	0,85%	2,20%	0%	KUNING
5	Prosentase RTLH	4,20%	0,66%	11,61%	11,02%	8,80%	1,00%	MERAH
Sasaran 3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan							
1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,10%	7,78%	8,45%	8,72%	8,83%	9,00%	HIJAU
Tujuan 2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan							
Sasaran 1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat							
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0,00%	0,19%	5,90%	16,99%	20,54%	10,00%	HIJAU
2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	44,78%	68,41%	169,26%	232,07%	312,96%	15%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif							
1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	HIJAU
2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	31,00%	30,84%	37,10%	33,17%	9,56%	31,00%	MERAH
Sasaran 3	Meningkatnya ketahanan pangan							
1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	13.501	13.637	13.820	13.952	14.158	12.985	HIJAU
Tujuan 3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan							
Sasaran 1	Meningkatnya lapangan kerja							
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,21%	65,00%	65,00%	65,00%	51,41%	70,00%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS							
1	Persentase Penurunan PMKS	2,00%	9,61%	5,07%	13,24%	-41,31%	18,00%	MERAH
Tujuan 4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat							
Sasaran	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan							
1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2,00	2,03	2,03	2,03	2,00	2	HIJAU
Tujuan 5	Meningkatkan kesetaraan gender							
Sasaran	Menurunnya kesenjangan gender							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,05%	6,37%	20,00%	5,07%	7,50%	26,00%	MERAH
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	13,93%	14,06%	23,00%	11,37%	16,80%	30,00%	MERAH
3	Rasio KDRT	0,066%	0,035%	0,110%	0,006%	0,002%	0,040%	HIJAU
Misi 4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang							
Tujuan 1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah							
Sasaran	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan							
1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,00%	15,00%	17,41%	17,41%	15,63%	15,50%	HIJAU
2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	35	35	35	35	20	HIJAU
Tujuan 2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata							
Sasaran	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial							

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	1.139.585	3.447.841	827.631	1.560.199	524.052	1.141.899	MERAH
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	6.793	17.162	3.559	3.559	4.123	5.210	KUNING
Misi 5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani							
Tujuan 1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius							
Sasaran 1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan							
1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3,00%	1,06%	3,18%	4,74%	31,03%	3,00%	HIJAU
Sasaran 2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat							
1	Angka kriminalitas	14,02%	13,31%	11,77%	10,90%	10,47%	11,64%	HIJAU
2	Prosentase penurunan kasus narkoba	3,00%	6,00%	3,00%	3,00%	28,57%	3,00%	MERAH
3	Angka kriminalitas yang tertangani	9,89	9,70	8,85	8,21	7,73	12,50	MERAH
4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	HIJAU
Tujuan 2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman							
Sasaran	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan							
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,54%	3,22%	3,31%	3,31%	3,35%	3,00%	HIJAU
2	Ketersediaan kelembagaan pusat-pusat keagamaan (religious centre)	0	0	1	0	0	1	MERAH

Sumber: hasil analisis Bappeda tahun 2021

Keterangan:

HIJAU	Kinerja ST (lebih dari 90%)
KUNING	Kinerja T ($\leq 90\%$ dan $> 75\%$) dan S ($\leq 75\%$ dan $> 65\%$)
MERAH	Kinerja R ($\leq 65\%$ dan $> 50\%$) dan SR ($\leq 50\%$)

Secara umum, sampai dengan tahun 2020, indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 belum seluruhnya tercapai. Dari total 83 indikator sasaran, baru tercapai 46 indikator sasaran. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Indeks Pencemaran Air, persentase RTH Publik, Pelayanan air minum, dan pengurangan luas Kawasan kumuh.

B. Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan tahun 2020 RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Pada bagian ini disajikan evaluasi capaian indikator kinerja sesuai Permendagri 86 tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, dengan keterangan status capaian sebagai berikut:

- ST : Sangat Tinggi ($90\% < \text{Kinerja RKPD Th. 2020}$)
- T : Tinggi ($75\% < \text{Kinerja RKPD Th. 2020} \leq 90\%$)
- S : Sedang ($65\% < \text{Kinerja RKPD Th. 2020} \leq 75\%$)
- R : Rendah ($50\% < \text{Kinerja RKPD Th. 2020} \leq 65\%$)
- SR : Sangat Rendah ($\text{Kinerja RKPD Th. 2020} \leq 50\%$)

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1 Urusan Pendidikan

Kinerja urusan Pendidikan diukur melalui 45 indikator, dengan capaian terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016 – 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	69%	67,12%	72,18%	81,5%	87,1%	89,69%	129,98%	ST
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	56%	48,45%	48,45%	51,5%	51,5%	52,11%	96,5%	ST
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI/Paket A	121%	120,76%	114,45%	132,36%	109,18%	98,09%	81,06%	T
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	134%	133,41%	127,73%	144,13%	133,21%	119,68%	89,31%	T
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	125%	115,73%	118,99%	134,06%	136,92%	123,44%	98,75%	ST
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	169%	145,76%	149,87%	168,86%	176,09%	158,58%	93,83%	ST
		Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12	1:136	1 : 153	1 : 150	1 : 132	1 : 151	1:151	111,02%	ST
		Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 13-15	1:290	1 : 276	1 : 268	1 : 238	1 : 309	1:309	106,55%	ST
		Rasio guru SD terhadap murid SD	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	100%	ST
		Rasio guru SMP terhadap murid SMP	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14,5	100%	ST
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	1	0,01	0,02	0,01	0,0%	100%	ST
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,04	0,04	0,09	0,10	0,16	0,00	100%	ST
		Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun	0,001	0,009	0,005	0,005	0,001	0,0005	-	ST
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	150%	149,5%	149,67%	146,26%	135,90%	123,03%	82,02%	T
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA	165%	152,99%	144,31%	124,3%	106,30%	135,25%	82,57%	T
		Persentase sekolah yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	ST
		Penurunan jumlah kenakalan pelajar	24 pelajar	50 pelajar	44 pelajar	42 pelajar	47 pelajar	0 pelajar	100%	ST
		Adanya kebijakan muatan lokal budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa	1	1	1	1	1	1	100%	ST
		Prosentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	100%	100%	100%	100%	100%	105,26%	ST
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan memenuhi universal design	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	ST
3	Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun	97,95%	98%	98,56%	98,67%	97,56%	97,63%	99,67%	ST
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	30%	25%	30%	28,75%	28,75%	28,75%	143.75	ST
		Jumlah Juara FASI	-	-	-	-	-	7		
		Jumlah Juara MTQ	2	-	-	-	-	2		
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	36,25%	96,20%	72,62%	75,27%	80,92%	88,54%	244,24%	ST
		Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	14,53%	14,07%	45,52%	52,65%	45,42%	24,91 %	171,43%	ST
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	83,56%	84%	89,66%	94,78%	95,30%	108,29%	ST
		Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	55,15%	60,07%	47,54%	45,52%	44,32%	45,12%	80,35%	T
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,40%	83,80%	94,58%	94,18%	96,09%	95,71%	99,28%	ST
		Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	68,67%	57,30%	61,61%	76,71%	67,61%	68,20%	99,31%	ST
		Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi	80%	60,10%	65,02%	68,97%	87,34%	87,34%	109,17%	ST
		Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa	80%	100%	100%	100%	100%	87,34%	109,17%	ST
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke Desa Buku	2.000	1500	913	2476	2476	0	0	SR
		Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional	52 pelajar	41 pelajar	17 pelajar	34 pelajar	23 pelajar	1 pelajar		
		Provinsi	34 pelajar	29 pelajar	14 pelajar	22 pelajar	21 pelajar	0	0%	SR
		Nasional	18 pelajar	12 pelajar	3 pelajar	12 pelajar	2 pelajar	1 pelajar	0,06%	SR
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B* (Tujuan 4)	97%	97,40%	88,31%	100%	96,15%	98,5%	101,54%	ST
		Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B* (Tujuan 4)	100%	86,96%	95,65%	100%	95,65%	95,65%	100%	ST
		Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs	50%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	ST
		Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi* (Tujuan 4)	85%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	ST
7	Program Pendidikan Berkelanjutan	Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar	100%	35,03%	64,97%	60,08%	74,65%	74,65%	74,65%	S
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching	60%	30,01%	74,95%	71,22%	65,17%	56,99%	94,98%	ST

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terdapat 45 indikator kinerja, adapun realisasinya 43 indikator capaiannya tinggi dan sangat tinggi, 1 indikator capaiannya sedang, dan 1 indikator capaiannya sangat rendah yaitu Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional.

Dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan, terdapat 4 indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2020 $\geq$ 150% target RPJMD), yaitu:

1. Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik, faktor pendorongnya adalah:
 - a. Peningkatan kualifikasi S 1/D4 Guru PAUD
Guru PAUD di Kota Magelang sebagian besar sudah menempuh pendidikan jenjang S 1 / D4, jumlah total Guru PAUD di Kota Magelang sebanyak 262 orang dan yang sudah menempuh pendidikan jenjang S 1/D4 sebanyak 232 atau 88.54%.
 - b. Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD
Semua Guru PAUD mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik Diklat Dasar maupun Diklat berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan mempersiapkan pendidik untuk lebih profesional.
2. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, faktor pendorongnya adalah adanya penekanan dari pemerintah pusat maupun daerah kalau semua Guru atau pendidik harus mempunyai ijazah Sarjana yang linear;
3. Persentase Sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs, faktor pendorongnya adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa sarana prasarana yang memadai di semua Sekolah Menengah Pertama sehingga semua sekolah di Kota Magelang sudah melaksanakan CBT;
4. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, faktor pendorongnya adalah adanya dukungan sarana prasarana yang memadai dari Pemerintah Daerah di semua sekolah di Kota Magelang.





Gambar 1-1
Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan teknologi informasi

Disisi lain terdapat satu indikator yang masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu:

1. Jumlah kunjungan ke Desa Buku, dikarenakan mulai awal 2020 UPT Desa buku sudah ditutup.
2. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Propinsi dan Nasional

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang Provinsi dan Nasional dari Target 32 di jenjang Provinsi sampai saat ini belum ada yang meraih prestasi dan di jenjang Nasional dari target 16 hanya tercapai 1 hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Target ditentukan masih mengikutsertakan capaian prestasi pada sekolah SMA/SMK, sedangkan mulai tahun 2017 Kewenangan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Adanya penyebaran virus Corona (Covid-19) sehingga semua kegiatan perlombaan di tingkat provinsi ditiadakan di tahun 2020;
- c. Kurangnya pembimbingan/pendampingan dari tenaga Ahli/Profesional dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi untuk Lomba MAPSI, Lomba Olimpiade Sains Nasional untuk Cabang Matematika, IPA dan IPS;
- d. Kompetisi perseorangan yang sangat ketat untuk Lomba di Tingkat Provinsi dan Nasional.

Selain hal tersebut diatas terdapat 5 indikator capaian kinerja belum tercapai tetapi optimis akan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi

Persentase Lembaga PAUD Yang Terakreditasi (Target 54%, Realisasi 52,11%), target tidak tercapai di akhir tahun 2020 disebabkan terbatasnya jumlah kuota lembaga PAUD yang diakreditasi dari Badan Akreditasi Provinsi yang hanya 5 – 6 lembaga. Sehingga berpengaruh pada pembilang Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi di Kota Magelang berjumlah 94 lembaga. Dilihat dari perhitungan untuk mencapai target akhir RPJMD 2021 sebesar 56% (100 lembaga PAUD) Kota Magelang masih kurang 6 lembaga yang harus terakreditasi. Dari data tersebut optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

2. Angka melanjutkan SD ke SMP

Angka Melanjutkan SD ke SMP (Target 150%, Realisasi 123,03%), target tidak tercapai kurang 26,97% disebabkan oleh adanya sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru, sebagian lulusan SD/MI yang berdomisili dari luar

Kota Magelang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP/MTs di Kota Magelang, namun demikian dapat dipastikan bahwa seluruh lulusan SD/MI di Kota Magelang semuanya dapat tertampung di jenjang SMP/MTs. Dari data jumlah lulusan SD/MI di Kota Magelang sebanyak 2.432 siswa dan daya tampung SMP/MTs sebanyak 3.305 siswa sehingga dipastikan di Kota Magelang tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs.

3. Angka melanjutkan SMP ke SMA

Angka Melanjutkan SMP ke SMA (Target 160%, Realisasi 135.25%), target tidak tercapai disebabkan karena lulusan SMP melanjutkan sekolah ke Sekolah Kejuruan/SMK. Namun demikian karena adanya sistem Zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian siswa lulusan SMP/MTs yang berdomisili dari luar Kota tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA di Kota Magelang. Dari data jumlah lulusan SMP/MTs di Kota Magelang sebanyak 3442 siswa dan daya tampung SMA/SMK sebanyak 3659 siswa sehingga dipastikan di Kota Magelang tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di jenjang SMA/SMK.

4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik

Persentase Guru SD bersertifikat Pendidik (Target 54,15%, Realisasi 45,12%), target tidak tercapai masih kurang 9,03%. Dari data Guru SD/MI yang berjumlah 862 baru 389 Guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik banyak yang pensiun.

Untuk memenuhi target RPJMD 2021 yaitu 55,15% atau sebanyak 475 guru SD maka harus ada penambahan sebanyak 86 guru, untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan pendidikan profesi Guru (PPG) bagi Guru SD yang belum bersertifikasi pendidik agar semakin banyak guru SD yang mendapatkan Sertifikat Pendidik. Data tahun ini Guru SD yang mengikuti PPG sebanyak 100 orang sehingga untuk 1 tahun kedepan (akhir RPJMD) optimis target bisa tercapai.

5. Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar (Target 100%, Realisasi 74,65%), target tidak tercapai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan kursus mahir dasar pada Tahun 2020. Dari Jumlah Guru Pembina PRAMUKA 1.440 yang sudah mengikuti kursus Mahir Dasar berjumlah 1.075. Adapun kursus mahir dasar pramuka bagi pembinaan pramuka diselenggarakan di beberapa sekolah melalui fasilitasi anggaran BOSDA.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras dan melakukan pembaharuan/inovasi dalam bidang pendidikan. Di Kota Magelang inovasi dalam pendidikan yang dilakukan antara lain GPS (Gerakan Peduli Siswa), JBM (Jam Belajar Masyarakat) dan Gelis Suci (Gerakan Literasi Membaca Kitab Suci).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu:

1. Kemerosotan Akal dan Budi Pekerti Peserta Didik SD maupun SMP
2. Belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Standar Sarana Prasarana (Sarpras);.
3. Belum meratanya persebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Magelang;
4. Belum tersedianya Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Sanggar Kegiatan Belajar/ SKB) di Kota Magelang;

5. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
6. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
7. Belum efektifnya pendidikan karakter dan nasionalisme di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

1.2 Urusan Kesehatan

Indikator kinerja urusan kesehatan melibatkan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%	98.82%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%	67.81%	1,59%	1,80%	2,38%	4,76%	100%	ST
		Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%	11.88%	8,04%	0,45%	0,71%	1,47%	100%	ST
		Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%	0.16%	0,20%	0,15%	0,15%	0,89%	100%	ST
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	75%	100%	70%	100%	100%	100%	133,33%	ST
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	98%	97,26%	95,96%	97,99%	99,15%	98,61%	100,62%	ST
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	NA	0%	SR
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<0,31%	0.33	0,19%	0,25%	0,19%	0,69%	44,92%	SR
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	86,1%	86.61%	71,24%	85.21%	86.30%	87,01%	101,06%	ST
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>)	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Angka Kesakitan DBD	<50	72.03	49,66	39,99	58,33	17,97	100%	ST
		Angka Prevalensi Kasus (<i>Case Notification Rate</i> = CNR) TB	<101	122.59	153,49	154.61	174.23	195,28	51,72%	R
		Angka Penemuan Kasus (<i>Case Detection Rate</i> = CDR) TB	90	59.29%	47%	59.29%	88.49%	85,61%	95,12%	ST
		Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,5%	0.02%	0,03%	0,02%	0,01%	0,03%	100%	ST
		Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	92,5%	100%	100%	100%	100%	100%	108.11%	ST
		Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah terakreditasi	100%	92,31%	100%	100%	100%	88,24%	88,24%	T
		Persentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	ST
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	ST
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100%	100%	79,12%	100%	100%	ST
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin	15%	28.59%	4,80%	15%	25.03%	NA	0%	
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design	50%	39.68%	39,68%	43.75%	50%	50%	100%	ST
11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri	76,47%	52.94%	52,94%	47.06%	64.71%	76,47%	100%	ST
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%	100%	100%	100%	100%	100%	117,65%	ST
		Cakupan Kunjungan Bayi	96%	96.76%	97,05%	98.49%	96.54%	98,75%	102,79%	ST
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	82.94%	91%	97.05%	95.17%	64,54%	71,71%	S
		Cakupan Puskesmas Ramah Anak	35,29%	100%	100%	100%	100%	100%	283,37%	ST
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%	43.98%	60,64%	74,47%	78,60%	75,92%	94,90%	ST
		Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	35,29%	100%	100%	100%	100%	100%	283,37%	ST
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	90%	94.44%	99.45%	97.80%	91.23%	94,96%	105,51%	ST
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%	100%	100%	100%	96,24%	100%	105,26%	ST
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	105,26%	ST
		Cakupan Pelayanan Nifas	100%	99.93%	99,90%	100%	99,87%	99,86%	99,86%	ST
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	A	A	A	A	A	75	S

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2020

Dari ke-41 indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat 36 indikator capaiannya sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang dan 3 indikator dengan capaian sangat rendah.

Beberapa indikator dengan status kinerja sedang, rendah maupun sangat rendah yaitu :

1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD bahkan dengan status kinerja yang sangat rendah, penyebab utamanya adalah adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan pendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan yaitu pemberian makanan tambahan pada balita yang dilaksanakan pada saat kegiatan Posyandu.
2. Prevalensi Balita Gizi Buruk
Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD akibat adanya pandemic COVID-19. Hal ini menyebabkan jumlah balita yang ditimbang saat posyandu pada tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan capaian indikator ini didapatkan dari jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah seluruh balita yang ditimbang, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi riil dari kasus balita gizi buruk. Terindikasi terjadi kenaikan jumlah balita gizi buruk akibat dampak pandemic COVID-19, namun demikian belum diketahui jumlah pasti jumlah balita gizi buruk yang ditemukan. Memperhatikan hal tersebut perlu diupayakan suatu inovasi yang memungkinkan pelayanan terhadap balita dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
3. Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB
Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD disebabkan karena:
 - rendahnya pengetahuan akan bahaya TB yang sangat mudah menular dan tidak segera diadakan pengobatan meskipun sudah ada gejala TB.
 - banyak penderita TB yang tidak menyelesaikan masa pengobatan selama 6 bulan, sehingga suatu saat mereka akan sakit lagi.
 - Data diperoleh dari BP Paru Kota Magelang sehingga data masih tercampur dengan data penderita TB yang bukan penduduk Kota Magelang.
4. Cakupan Pelayanan Anak Balita
Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD disebabkan karena adanya pandemic COVID-19 sehingga jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan melalui kegiatan posyandu mengalami penurunan.. Memperhatikan hal tersebut perlu diupayakan suatu inovasi yang memungkinkan pelayanan terhadap balita dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
5. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan
Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD disebabkan karena adanya pandemic COVID-19 yang sangat mempengaruhi kinerja pelayanan pada RSUD Tidar. Dengan adanya pandemic ini masyarakat jadi takut untuk berkunjung ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mengakibatkan turunnya mutu pelayanan dan operasional.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, sebagian besar capaian kinerja indikator urusan ini sudah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian masih ada beberapa indikator dengan capaian kinerja dibawah target akhir

RPJMD. Mengingat Tahun 2021 ini adalah tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 maka perlu perhatian lebih dan upaya yang sangat keras sehingga target tersebut dapat tercapai sampai dengan akhir RPJMD. Sedangkan untuk indikator yang telah memenuhi target diharapkan terus terjaga dan dipertahankan kinerjanya sampai dengan akhir RPJMD.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun 2021 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama bagi indikator yang perlu upaya keras antara lain dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Memberdayakan masyarakat melalui program “Ketuk Pintu” yaitu dengan memanfaatkan kader kesehatan masyarakat yang terdapat di tiap-tiap kelurahan untuk bisa mendeteksi apabila ada warga masyarakat yang suspect TB dan menghimbau agar berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas di wilayahnya.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat dan petugas rumah sakit, puskesmas serta dokter praktek swasta dan apotek agar melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila ditemukan kasus TB.
- 3) Dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) yaitu kunjungan secara door to door oleh petugas dari puskesmas kepada warga masyarakat sekitar. Dengan program ini diharapkan dapat ditemukan berbagai kasus penyakit yang ada di masyarakat termasuk TB.

1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang antara lain ditunjukkan dengan indikator yang terbagi ke beberapa sub urusan sebagai berikut::

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s/d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pemanfaatan Ruang	1) Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	33 %	21.47%	23.33%	24.14%	25.48%	26.12%	79.16%	T
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1) Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	40%	27.33%	30.54%	16.67%	223.21%	161.31%	403.27%	ST
3	Program Perencanaan Tata Ruang	1) Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)	100%	N/A	7.69%	8.33%	8.33%	8,33%	8.33%	SR
		2) Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	52.36%	52.36%	R

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s/d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		3) Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	15.00%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	SR
4.	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	1) Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	2.242 meter	0 meter	1,192 meter	1,712 meter	2,055 meter	2,055 meter	91.66%	ST
		2) Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	71,89%	63.82%	65.12%	71.09%	74.83%	74.95%	104.77%	ST
5.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1). Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	89%	84.00%	85.00%	87.26%	87.94%	92.44%	103.87%	ST
		2). Jumlah shipon yang dibangun	10 bh	6.00	7.00	7.00	9.00	9 bh	90.00%	T
6.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	80%	70.00%	75.00%	96.00%	65.10%	79.10%	98.88%	T
7..	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	100%	79.00%	81.00%	81.00%	81.00%	81%	81.00%	T
8.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Persentase kawasan strategis yang terbangun	(4 kawasan) 100%	50%	75%	75%	75%	75%	75%	S
9.	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Prosentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik	100%	91.00%	81.00%	80.00%	80.00%	80%	80.00%	T
10.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	100%	88.24%	89.47%	89.47%	89.47%	94.74%	94.74%	T
11.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	96%	90.54%	93.24%	93.24%	94.59%	96.20%	100.21%	ST
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	95%	88.50%	90.00%	93.67%	94.00%	94.63%	99.62%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s/d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
12.	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung	1. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi	100%	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%	40.00%	40.00%	SR
		2. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas	100%	20.00%	40.00%	42.94%	43.78%	74.95%	74.95%	S
13.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	1. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	20.00%	85.71%	100.00%	100.00%	40%	160.00%	ST
14	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau (ha)								
		a. Privat	10%	n/a	n/a	19.10%	19.10%	19.11%	191 %	ST
		b. Publik	18,50%	n/a	n/a	n/a	16%	16%	86.49%	T

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2020

Dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 12 (dua belas) indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 3 (tiga) indikator dengan kinerja tinggi, 2 (dua) indikator kinerja sedang, 1 (satu) indikator kinerja rendah dan 3 (tiga) indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target Tahun 2020 dan Akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah yaitu:

a. Indikator kinerja sedang meliputi:

a.1. *Persentase kawasan strategis yang terbangun* mencapai 75%, dari sebanyak 4 (empat) buah kawasan strategis daerah yang ditinjau dari sudut fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan (kawasan pertahanan negara), lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial yang ditetapkan dalam RTRW Kota Magelang, kawasan pertahanan negara dalam perubahan RTRW Tahun 2020 dihapuskan karena kewenangan Pusat. Selama ini penanganan kawasan strategis Hankam sebatas koordinasi dan penanganan jalan umum yang masuk dalam kewenangan Kota Magelang. Meskipun keluar dari capaian indikator dari kawasan strategis Daerah penanganan jalan dan koordinasi bangunan dugaan cagar budaya akan terus dilakukan oleh Pemkot Magelang. Secara keseluruhan kawasan strategis daerah fungsi lainnya, sudah ada sentuhan meskipun belum menyeluruh, kendala selama ini adalah dalam pemenuhan Readiness Criteria (RC) terutama adalah ketersediaan aset berupa lahan dan pengintegrasian dengan proyek strategis/prioritas nasional.

a. 2 *Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas* mencapai 74.95%, dikarenakan baru memenuhi sepanjang 179,139 m dari target trotoar seluruhnya 239,010 m dengan rencana sudah dilengkapi atau memenuhi aspek aksesibilitas untuk semua. Rendahnya kinerja dari indikator ini dikarenakan sempitnya ketersediaan lahan

beberapa trotoar, tempat media pohon RTH, pemanfaatan untuk berjualan PKL, dan kondisi dalam kondisi rusak minor di beberapa ruas jalan, dan masih digunakan untuk media penampatan prasarana atau utilitas umum seperti Jaringan Listrik dan Penerangan, serta rambu lalu lintas.

- b. Indikator Kinerja Rendah berupa Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang mencapai 52.36% merupakan kinerja yang diukur pertahun berupa perizinan pemanfaatan ruang berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi perizinan IMB yang sudah teregistrasi dan tertanda tangani apabila memenuhi persyaratan. Meskipun rendah capaian kinerjanya, ke depan optimis kinerja akan tinggi sehingga tidak akan berpengaruh kedalam target RPJMD, karena memang pandemi *covid-19* turut menunda pemohon untuk melanjutkan pengurusan proses perizinan bangunannya dan SKRK sendiri mempunyai jangka waktu berlaku hingga 3 tahun untuk mengajukan IMB.
- c. indikator kinerja sangat rendah meliputi:
 - c.1 Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) yang baru mencapai 1 buah yaitu Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, yang baru disahkan pada tanggal 17 Juli 2020. Dimana pemenuhan syarat administratif dan teknis memerlukan proses yang panjang dengan peninjauan kembali sejak 9 Agustus 2016. Sehingga RDTRK dan RTBL belum dapat diproses meskipun sudah memiliki draft awal RDTRK dan RTBL.
 - c.2 Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital mencapai 16,67%, dimana terkait dengan capaian peraturan perundangan di bidang tata ruang dan rencana rincinya yang sudah disahkan, baru 1 yang tercapai yaitu RTRW dari 6 buah target berupa 1 peta RTRW dan 5 Peta RDTRK dalam bentuk analog dan digital.
 - c.3 Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi mencapai 40%, bukan merupakan cerminan rendahnya jumlah konstruksi yang sesuai K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien di Kota Magelang. Setiap tahun ada sekitar 30-an terkait kegiatan bangunan gedung terutama untuk bangunan penunjang di kawasan strategis akan tetapi kemudian direalokasikan karena pandemi covid-19. Target dari 5 kegiatan rehabilitasi/peningkatan atau pembangunan gedung, hanya ada 2 kegiatan yang membutuhkan kompleksitas dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknisnya yang meliputi pekerjaan arsitektural, struktur, dan mekanikal elektrik yaitu kantor DPUR dan DLH.

1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur melalui 22 (dua puluh dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Cacaban	Rasio luas kawasan Kumuh	0	5,61	2,81	1,34	1,1200	0	100 %	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
2	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Gelangan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	5,55	5,28	1,06	0,9200	0	100 %	ST
3	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	3,14	0	0	0	0	100 %	ST
4	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Jurangombo Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	2,45	1,4	1,1	0	0	100 %	ST
5	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kedungsari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	6,46	4,462	4,122	1,3305	0	100 %	ST
6	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kemirirejo	Rasio luas kawasan Kumuh	0	9,98	0,4	0,4	0,3800	0	100 %	ST
7	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	4,6	4,37	4,37	0,3700	0	100 %	ST
8	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Kramat Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	15,2	4,11	0,28	0	0	100 %	ST
9	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magelang	Rasio luas kawasan Kumuh	0	4,87	7,9	7,9	0	0	100 %	ST
10	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Magersari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	4,59	0,19	0,19	0	0	100 %	ST
11	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Panjang	Rasio luas kawasan Kumuh	0	7,26	7,71	0	0	0	100 %	ST
12	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Potrobangsari	Rasio luas kawasan Kumuh	0	2,89	1,85	1,85	0,8000	0	100 %	ST
13	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	4,42	1,04	0,42	0	0	100 %	ST
14	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Rejowinangun Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	12,12	10,895	4,791	1,2980	0	100 %	ST
15	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Selatan	Rasio luas kawasan Kumuh	0	2,34	4,092	1,702	0,4000	0	100 %	ST
16	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Tidar Utara	Rasio luas kawasan Kumuh	0	2,88	3,77	2,16	0,8000	0	100 %	ST
17	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Kelurahan Wates	Rasio luas kawasan Kumuh	0	2,41	7,126	5,516	3,3600	0	100 %	ST
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1) Persentase Penduduk berakses air minum	100%	85,24%	87,88%	93,78%	96,05%	96,91 %	96,91%	T
		2) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	90%	82,7	85,3	86,75	88,89	88,92	88,92 %	T
		3) Tersedianya sistem air limbah skala Kawasan* (Tujuan 6)	10%	6,5	6,69	7,62	8,23	8,28	82,8 %	T
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni	5 unit	1	2	3	3	3	60 %	R
	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase RTLH	0 %	4,2 %	0,66%	11,61%	11,02%	8.80%	0 %	SR

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang, 2020

Indikator kinerja pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 22 indikator. Terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang capainnya sangat tinggi (ST), 3 (tiga) indikator yang capainnya tinggi (T), dan 2 (dua) indikator dengan capaian Rendah dan sangat rendah (SR).

Dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat beberapa indikator yang capaiannya sesuai dengan target dan ada juga yang capaiannya sangat jauh dari target yang telah ditentukan, antara lain sebagai berikut :

1. Persentase luas kawasan kumuh pada tahun 2020 sudah mencapai 0%,

Luas kawasan kumuh di Kota Magelang pada tahun 2015 sesuai dengan SK Kumuh nomor 050/280/112-310 tahun 2015 telah ditetapkan dengan luasan 121,17 Ha, kemudian diperbaharui lagi dengan SK Kumuh pada tahun 2018 nomor 050/10 B/112 tahun 2018 dengan luasan 67,41 Ha. Pemerintah Kota Magelang bersama mitra dalam penanganan kawasan kumuh pada tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan kawasan kumuh yang ditetapkan berdasarkan SK Kumuh tahun 2015.

Namun demikian, permasalahan baru muncul dengan keluarnya SK Kumuh nomor 050/117/112 Tahun 2021 yang ditetapkan mengacu pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2018, terdapat baseline kawasan kumuh seluas 39,93 Ha. Dengan adanya perubahan luas kawasan kumuh ini menjadi tugas penyelesaian pada perencanaan tahun-tahun ke depan.

2. Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni dimana capainnya masih 60 %

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah: pembangunan Rusunawa dan Rusunami yang dilaksanakan selama ini menggunakan anggaran dari pemerintah Pusat dimana dalam pengajuannya mensyaratkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Disamping itu keterbatasan lahan di Kota Magelang juga menyulitkan lahan untuk pembangunan Rusunawa dan Rusunami.

3. Prosentase Rumah Tidak Layak Huni capainnya baru 8,8 %.

Adapun yang menjadi hambatan dalam mencapai target yang diharapkan antara lain :

- a. Terdapat titik atau lokasi yang tidak dapat terjangkau dalam optimalisasi rumah layak huni, hal ini dikarenakan rumah tidak layak huni tersebut berada pada kawasan squater, dimana salah satu persyaratan utama dalam kegiatan ini adalah adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan rumah atau aset yang dimaksud.
- b. Kendala lain yang dihadapi pada wilayah di luar kawasan squater masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni dengan penghuni rumah bukan sebagai pemegang atas Hak Milik Tanah ataupun Bangunan (Rumah)/ bukan merupakan aset pribadi penghuni, banyak diantaranya sebagai penghuni tidak tetap atau penyewa rumah.
- c. Dalam hal penerima bantuan rumah layak huni, hanya diberikan pada penerima terdata dalam basis data terpadu yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni tidak bisa secara langsung menjadi calon penerima bantuan. Tetapi melalui usulan yang diajukan RT, RW, hingga kecamatan kepada tim pendukung dengan melakukan survey dan akan diverifikasi sebelumnya. Bantuan ini juga hanya diberikan pada calon penerima bantuan yang bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya. Hal ini menyebabkan terbatasnya para calon penerima bantuan. Sehingga dalam kondisi tersebut masih diperlukan kajian dan tinjauan lebih lanjut yang tidak hanya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman namun juga oleh berbagai pihak dalam mengatasi masalah ini, demi tercapainya hunian yang layak dan aman bagi masyarakat kota Magelang

- d. Sampai dengan tahun 2020, dinas perumahan dan permukiman telah menangani sebanyak 1.688 unit rumah. Berasal dari anggaran DAK, APBN lewat kementerian PUPR dan CSR Bank Pembangunan Jawa Tengah.
- e. Adapun penanganan RTLH yang saat ini belum terselesaikan adalah RTLH yang tidak memiliki kriteria untuk menerima bantuan dari dana pemerintah. Sebagian besar dari rumah ini berdiri di lahan pemerintah dan lahan PJK, sedangkan alasan lain biasanya karena status tanah tidak jelas atau sewa, belum menikah dan atau sudah pernah mendapat bantuan tetapi sudah rusak kembali.

Capaian beberapa indikator seperti persentase luas kawasan kumuh, persentase penduduk berakses air minum dan tersedianya sistem air limbah setempat untuk mencapai akses 100-0-100, pada akhir tahun 2020, masih perlu upaya kerja keras. Akan tetapi optimis pada akhir tahun RPJMD beberapa indikator untuk mencapai gerakan 100-0-100 akan tercapai. Sedangkan untuk capaian indikator jumlah Rusunawa dan Rusunawi layak huni dan persentase Rumah Tidak Layak Huni memerlukan beberapa inovasi dan terobosan-terobosan untuk pencapaian indikator tersebut.

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di atas berimplikasi pada penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Beberapa indikator masih perlu diupayakan pencapaiannya. Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan kolaborasi antar sektor dan antar stake holder dalam upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dengan perencanaan dan implementasi multi sektor secara komprehensif melalui Program Kampung Tematik.
2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengentasan kawasan kumuh di kawasan illegal
3. Kolaborasi dengan perbankan dalam penyediaan kredit sanitasi dan air minum
4. Meningkatkan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tak terjadwal
5. Perencanaan yang menyeluruh kondisi Kota Magelang yang sudah sangat padat penduduknya, lahan yang sempit.



6. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman
7. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni, pada tahun 2020 ini bekerjasama dengan CSR Bank Pembangunan Jawa Tengah. Melakukan Rehab Runah sejumlah 92 unit, dengan total dana sebesar Rp. 920.000.000,-

Tabel 1.5
Data Rumah penerima bantuan Rehab Rumah dari CSR Bank Pembangunan Jawa Tengah.

NO.	KELURAHAN	JUMLAH
1	KRAMAT UTARA	18
2	KRAMAT SELATAN	17
3	POTROBANGSAN	3
4	CACABAN	15
5	REJOWINANGUN UTARA	15
6	REJOWINANGUN SELATAN	11
7	MAGERSARI	13



Sebelum



Kondisi 50 %



Kondisi 100 %

1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 1.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 -2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat	10	4	6	10	10	8	80%	T
		Terpublikasikannya dialog antar agama	12	4	6	6	8	4	33,33%	SR
		Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	4	0	1	2	2	0	0%	SR
		Tingkat kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	6	6	3	6	6	200%	ST
2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini	100%	0	18,75%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase ormas yang difasilitasi	9,84%	6,62%	7,82%	9,50%	8,16%	0%	0%	SR
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kriminalitas yang tertangani	80%	70,59%	72,84%	75,16%	75,35%	73,88%	92,35%	ST
		Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ST
		Perda pelarangan peredaran narkoba	1	0	0	0	1	1	100%	ST
		Jumlah Kampung Bebas Narkoba	6	1	2	3	4	4	66,66%	S
		Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	0,74%	1,30%	2,69%	1,30%	0,23%	8,90%	SR
		Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15%	0,00%	2,44%	6,47%	9,71%	0%	0%	R
		Rasio jumlah siskamling aktif	1,00	68,46%	68,68%	72,08%	95,09%	48,21%	48,21%	ST
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	47,5%	34,93%	37,52%	40,15%	40,22%	41,19%	86,72%	T
		Cakupan tim relawan siaga bencana	14,71	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	180%	1223,66%	ST
		Cakupan rencana kontijensi mitigasi bencana	100%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100%	100%	ST
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	0,00%	24,49%	39,86%	49,83%	100%	100%	ST
		Cakupan penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana:	35,29%	0,00%	5,88%	11,76%	23,53%	23,53%	68,68%	S

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pratama	5	0	0	1	3	1		
		Madya	0	0	1	1	1	3		
		Utama	0	0	0	0	0	0		
		Kebijakan terkait penanggulangan bencana	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	ST
5	Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1	1	1	1	1	0	0%	SR
		Tingkat partisipasi politik	-	0,00%	0,00%	76,10%	86,90%	77,41%	-	-
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	80%	60,00%	27,25%	28,75%	1,94%	14,29%	17,86%	SR
		Database ormas yang akurat	77%	62,25%	69,55%	72,73%	80,41%	80,49%	104,53%	ST
		Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	57,39%	22,52%	0,82%	36,36%	45,71%	45,93%	80,03%	ST
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	3 kali/hari	100%	ST
		Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	100%	90,48%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	8	4,52	4,97	7,77	16,73	3,44	43%	SR
		Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	16,67	6,67%	18,46%	12,87%	6,42%	31,82%	190,88%	ST
		Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)	98%	100%	100%	100%	100%	100%	102,04%	ST
		Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27	51,26	56,02	61,77	78,83	80,22	103,82%	ST
		Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	23,97%	8,53%	17,05%	31,76%	35,15%	35,15%	146,64%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	21	6	9	6	6	6	28,57%	SR
8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat	95%	90,11%	100%	100%	100%	100%	105,26%	ST
		Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan	NA	0	1	1	1	1	100%	ST
		Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi	-	0	0	0	1	1	100%	ST
9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan - kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing - masing di tiap SKPD	75%	0%	37,93%	41,38%	41,38%	79,31%	105,75%	ST
		Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur	5%	0%	6,32%	12,22%	12,22%	- 13,55%	-2,71%	SR
		Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota	66,67%	0%	0%	66,67%	60,00%	26,67%	40%	SR
		Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat	5	0	5	6	6	39	780%	ST
		Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag	20%	0	4,9%	4,9%	4,9%	88,31%	441,55%	ST
		Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag	1	0	1	0	0	0	0%	SR
		Prosentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah	95%	80%	100%	100%	100%	100%	105,26%	ST
		Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SR
		Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan	2	1	0	0	0	3	1500%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat								
10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu	100%	0%	0%	76,10%	86,90%	77,41%	77,41%	T

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kesbangpol Kota Magelang, 2020

Sebanyak 45 indikator menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dari keseluruhan indikator tersebut, terdapat 26 indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 3 indikator dengan kinerja tinggi, 2 indikator kinerja sedang, 1 indikator kinerja rendah dan 13 indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

Kendala pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah diantaranya adalah ketidaksiapan dalam menghadapi pandemi Covid 19 sehingga pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam mencegah penyebaran pandemi tidak dapat diadaptasikan dengan cepat. Ketentuan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian indikator yang pada awalnya direncanakan berupa forum, rakor, sosialisasi dan pertemuan lainnya. Kurang siapnya OPD untuk merespon dan beradaptasi dengan pandemi menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja berikut ini:

1. Terpublikasikannya dialog antar agama
2. Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
3. Persentase ormas yang difasilitasi
4. Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN
5. Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS
6. Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah
7. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
8. Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota

Kendala lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah adalah:

1. Jumlah Kampung Bebas Narkoba
Kampung bebas narkoba sebagai wujud pilar pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya (P4GN) hingga saat ini belum memenuhi target. Kota Magelang saat ini menempati posisi kelima di Jawa Tengah dalam kerawanan narkoba (BNN Provinsi Jateng, 2021) dengan jumlah kasus narkoba pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus. Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Gubernur/Bupati dan Walikota Nomor 354/3041/SJ Tahun 2018 dan Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan Instansi terkait yaitu BNN

Provinsi/Kab/Kota, POLRI dan TNI. Koordinasi antara OPD pengampu urusan pemberdayaan masyarakat, urusan kamtramtibumlinmas, BNN, POLRI, TNI, kecamatan kelurahan serta masyarakat sebagai subyek kampung bebas narkoba saat ini belum berjalan optimal. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor inilah yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini.

2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
Kendala dalam pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana adalah belum adanya standar baku sebagai rujukan sehingga perencanaan awal penyediaan sarana prasarana sebanyak 592 item belum menggambarkan kebutuhan riil dan baru terealisasi sebanyak 295 item.
3. Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana
Kelurahan tangguh bencana merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang berfokus pada penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang mereka miliki. Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara kelurahan, dan multi pihak (lembaga kelurahan, pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, media). Terbangunnya sinergitas program antar multi pihak sangat penting utamanya dalam wujud advokasi, komitmen dan pembagian peran dalam pengelolaan resiko bencana.
4. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Jumlah Pol PP di Kota Magelang tahun 2020 sebanyak 44 orang dari 128.020 jiwa penduduk di Kota Magelang. Terbatasnya penerimaan CPNS baru untuk formasi ini kemudian disiasati dengan perekrutan bantuan Pol PP sehingga total SDM menjadi 215 orang.
5. Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas
Kendala pencapaian indikator ini adalah belum optimalnya koordinasi peran linmas dalam menjaga kamtramtibumlinmas pada lingkup wilayah kecil (skala kelurahan dan lingkungan). Patroli dalam kelompok kecil diperlukan untuk mengoptimalkan peran linmas pada level lingkungan.
6. Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparatur
Capaian indikator ini pada tahun 2020 sedikit meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 1.321.075.696,00 pada tahun 2019, menjadi Rp. 1.367.854.481,00 pada tahun 2020. Kendala dalam pengoptimalan ZIS aparatur karena BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah resmi oleh pemerintah menjalankan fungsinya sesuai akad yang sifatnya sukarela. Koordinasi perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan ZIS aparatur dapat berjalan optimal untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.
7. Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag
Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah belum adanya pedoman yang mengatur tempat ibadah oleh Kemenag. Standar yang kemudian diadopsi adalah terkait teknis bangunan gedung secara umum untuk menjamin kelaikan fungsi dan keamanan Gedung tersebut.
8. Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan
Embrio untuk mewujudkan indikator ini berupa lembaga keagamaan yang secara kolaboratif mewujudkan kehidupan toleransi di Kota Magelang. Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah pada terbatasnya lahan milik pemerintah untuk lokasi fisik religius center sehingga ke depan diperlukan koordinasi untuk merumuskan strategi yang tepat.

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan kamtramtubumlinmas di atas berimplikasi pada penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Beberapa indikator masih perlu diupayakan pencapaiannya. Implikasi pencapaian tersebut adalah:

1. Perlu peningkatan edukasi resiko NAPZA;
2. Perlu peningkatan peran pusat keagamaan dalam pembangunan manusia;
3. Perlu peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana;
4. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
5. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
6. Perlu penguatan peran masyarakat dan komunitas terhadap bencana dan P4GN;
7. Perlu peningkatan kondusivitas daerah;
8. Perlu peningkatan peran masyarakat, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dalam mewujudkan stabilitas daerah;
9. Perlu peningkatan kapasitas SDM pendukung trambumlinmas dan kebencanaan daerah;
10. Perlu peningkatan stabilitas politik daerah.

1.6 Urusan Sosial

Target dan realisasi indikator urusan sosial tahun 2020 sesuai dengan indikator RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2020 adalah tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos	100%	100.00%	98.30%	96.78%	63.99%	100%	100%	ST
		Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	21.80%	11.82%	15.25%	43.42%	19,35%	48,39%	SR
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	100%	100%	100%	100%	99,19%	99,19%	ST
		Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16,74%	8.31%	15.31%	13.44%	10.27%	66,81%	399,10%	ST
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM Sd.2021	Capaian					Kinerja Thd Target RPJMD	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
	Kesejahteraan Sosial	Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial	7	2.00	6.00	4.00	7.00	14	200%	ST
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100%	166,67%	ST
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	90%	85.24%	94.25%	68.46%	100.00%	100%	111,11%	ST
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia	83%	41.67%	61.53%	76.92%	0.00%	0%	0%	SR
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	40%	5.71%	19.53%	30.89%	40.74%	53,91%	134,77%	ST

Sumber : Dinas Sosial Kota Magelang, 2020

Dari ke-10 (sepuluh) indikator kinerja urusan sosial, terdapat 8 (delapan) indikator yang capaiannya sangat tinggi dan 2 (dua) indikator dengan status kinerja sangat rendah.

Indikator capaian kinerja yang belum memenuhi target RPJMD dengan status kinerja sangat rendah yaitu :

1. Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD bahkan dengan status kinerja yang sangat rendah, hal ini disebabkan karena kegiatan pendukung indikator ini yaitu bantuan ASLUT yang sebelumnya diberikan langsung kepada lansia penerima, sesuai ketentuan sejak tahun 2019 harus disalurkan melalui lembaga kesejahteraan sosial. Hal ini terkendala oleh belum adanya lembaga kesejahteraan sosial di Kota Magelang khususnya yang menangani lansia. Keberadaan Lembaga kesejahteraan sosial khusus lansia sangat dibutuhkan untuk menyalurkan secara langsung bantuan sosial kepada lansia penerima manfaat. Sementara bantuan untuk lansia dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui PKH baru sejumlah 42 lansia dari 217 lansia tidak potensial secara keseluruhan. Mengingat capaian indikator kinerja ini sangat tergantung dengan bantuan dari pemerintah

pusat maka sangat perlu dan mendesak bagi pemerintah Kota Magelang untuk mengintervensi pencapaian target indikator ini melalui penganggaran APBD Kota Magelang. Di tahun 2021 untuk mencapai target tersebut, maka akan diluncurkan program bantuan sosial bagi para lansia non produktif.

2. Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia.

Indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD bahkan dengan status kinerja yang sangat rendah. Kegiatan berupa pemberian bantuan kepada panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia, dimana di tahun 2021 target kumulatif adalah 83% (10 panti). Hingga tahun 2019 telah terealisasi 9 panti, sedangkan target tahun 2020 dilaksanakan di 1 panti. Target tersebut tidak tercapai karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan pendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk menyelesaikan target tersebut, maka di tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan di 1 panti.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, hampir semua indikator urusan ini sudah memiliki status capaian ST dan hanya dua indikator dengan status capaian SR yaitu indikator Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia. Mengingat saat ini adalah tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 maka perlu perhatian lebih dan upaya keras dalam pencapaian target indikator dengan status kinerja sangat rendah. Sedangkan untuk indikator yang telah memenuhi target diharapkan terus terjaga dan dipertahankan kinerjanya sampai dengan akhir RPJMD.

2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan dengan alokasi anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.468.972.000,- yang bersumber dari APBD Kota Magelang Rp. 2.170.178.000,- dengan serapan 90,86 persen dan yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 298.794.000,- dengan serapan 98,14 persen. Capaian Indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dari 3 (tiga) program, dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2020

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	TAHUN					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Wirausaha Baru	10%	12,50%	15,00%	10%	26%	16.70%	167%	ST
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	80%	93,77%	88,91%	68.43%	85.62%	51.42%	64%	R
		Persentase pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	80%	90,91%	70,18%	80%	71%	21.50%	27%	SR

2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	7.50%	0	2.40%	14.13%	34.05%	15.40%	205%	ST
		Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	80%	66,55%	69,20%	56.25%	47.07%	43.70%	55%	R
		Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	7.50%	0	25%	14.13%	0.33%	14.90%	199%	ST
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Coverage asuransi tenaga kerja* (Tujuan 10)	75%	69%	71,85%	71.99%	52.67%	97.60%	130%	ST
		Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	92,86%	83,33%	100%	100%	63.64%	127%	ST

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2020

Dari 8 indikator, terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya sangat tinggi, 2 (dua) indikator capaiannya rendah dan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah.

Secara umum capaian kinerja ketenagakerjaan dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia. Kondisi ekonomi dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Indikator yang langsung terpengaruh oleh kondisi pandemi adalah penempatan tenaga kerja dikarenakan menurunnya permintaan akan tenaga kerja, sementara jumlah penganggur meningkat. Kondisi lain yang terpengaruh adalah persentase pencari kerja terlatih baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan.

Secara detail kendala yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja ini adalah :

1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah:

1.1. Menurunnya permintaan tenaga kerja dikarenakan menurunnya permintaan akan barang dan jasa.

Dalam bulan April – Mei 2020 tidak ada permintaan tenaga kerja di Kota Magelang. Dalam kurun waktu tersebut justru banyak pengguna tenaga kerja yang merumahkan pekerjaannya untuk menjaga biaya operasional tetap terjangkau.

1.2. Kualifikasi tenaga kerja yang diminta pengguna tenaga kerja tidak bisa dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja di Kota Magelang.

Di masa pandemi kebutuhan tenaga kerja di sektor garmen/ konveksi cukup besar, akan tetapi minat pencari kerja Kota Magelang sangat kecil, sehingga kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi.

2. Persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan.

Kendala yang dihadapi adalah :

1.1. Peningkatan jumlah peminat pelatihan lebih tinggi dibandingkan kapasitas pelatihan. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi, jumlah peminat sebanyak 691 orang sementara kapasitas pelatihan sebesar 212 peserta pelatihan, di Tahun 2019 jumlah peminat hanya 404 orang saja dengan kapasitas pelatihan sebanyak

190 peserta pelatihan.

- 1.2. Akibat pengurangan pekerja di sektor formal, jumlah peminat pelatihan kerja berbasis kewirausahaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi di Tahun 2020 ini jumlah peminat sebanyak 418 orang, sementara kapasitas pelatihan hanya 90 orang. Dibandingkan tahun lalu jumlah peminat hanya 17 orang dengan kapasitas pelatihan 12 orang.

Dari 8 indikator urusan ketenagakerjaan, 6 indikator diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD, 2 perlu upaya keras dan inovasi untuk dapat mewujudkannya di akhir perencanaan RPJMD 2016-2021. Dua indikator yang perlu upaya adalah: persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase pencari kerja terlatih berbasis kompetensi dan kewirausahaan.

2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	ST
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga	55,79%	53,66%	58,54%	63,41%	63,41%	63,41%	113,66%	ST
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT (Tujuan 16)	0,040%	0,350%	0,147%	0,195%	0,007%	0,002%	2000%	ST
		Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Tujuan 5, 16)	15	12	12	48	17	16	106,67%	ST
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (Tujuan 5)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	106.25%	106.25%	ST

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Tujuan 16)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106,25%	ST
		Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas	8%	1,07%	1,07%	8,11%	19,96%	45,14%	564,25%	ST
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	11,05%	6,37%	NA	NA	7,50%	57,03%	R
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	35%	13,93%	14,06	NA	NA	16,82%	48,06%	SR

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,00%	30%	59,18%	78,50%	NA	95,74%	119,68%	ST

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara agregat capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkatagori sangat baik, hal tersebut terlihat dengan adanya 13 indikator kinerja berpredikat sangat tinggi, 1 indikator kinerja berpredikat rendah, dan 1 indikator dengan predikat sangat rendah. Capaian indikator terkatagori rendah/sangat rendah adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta yang merupakan hasil perhitungan dari jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, dibandingkan dengan jumlah perempuan bekerja (wanita usia produktif 20 tahun sampai dengan 59 tahun) pada tahun berjalan.

Sampai dengan akhir tahun 2020 dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang hasil penghitungan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang tercatat sebesar 27.392 orang. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 2.055 orang perempuan bekerja di lembaga pemerintah dan 4.607 orang perempuan bekerja di lembaga swasta. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwasannya masih terdapat kesenjangan atau gap yang cukup tinggi pada angka partisipasi perempuan khususnya yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta, sehingga kedepan perlu dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan peran perempuan di Kota Magelang melalui program-program pemberdayaan perempuan agar kedepan perempuan dapat lebih kompetitif dalam lapangan kerja.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 2 (dua) indikator yang memerlukan akselerasi percepatan pencapaian, yaitu indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta dengan status capaian rendah/sangat rendah.

2.3 Urusan Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	2	1	1	2	2	2	100,00%	ST
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)	95,00%	84,00%	92,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100%	ST
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,20%	83,70%	85,00%	86,30%	87,60%	88,90%	98,56, %	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	100%	ST

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2020

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja dari Tabel di atas, bahwa semua indikator di urusan Ketahanan Pangan sudah tercapai targetnya dengan baik. Empat indikator tersebut adalah jumlah regulasi ketahanan pangan, persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan semua skornya di atas 90%.

Namun begitu Kota Magelang masih mengalami kekurangan dari segi produksi pangan dibandingkan dengan konsumsi pangan, dalam hal ini beras. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Penduduk Kota Magelang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Kelompok/Jenis Pangan	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Angka Konsumsi Penduduk Kota Magelang (kg/kapita/tahun)	1. Padi-padian	94,3	98,3	99,4
		- Beras giling	83,7	84,8	84,8
		- Jagung Pipilan	0,3	1,4	1,1
		- Tepung terigu	10,3	12,1	13,4
		2. Umbi-umbian	46,6	66,4	60,9
		- Ketela pohon	41,7	61,6	55,7
		- Ubi Jalar	1,6	1,0	2,0
		- Sagu	0,0	1,2	0,0
		- Kentang	3,1	3,8	4,2
		- Talas	1,7	1,2	0,7
2	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (TON)		13,820	13,952	14,158

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Magelang masih belum bisa mewujudkan kemandirian pangan. Kondisi Petani yang sebagian besar merupakan petani penggarap sawah dan merupakan tenaga jasa sangat mempengaruhi rendahnya produksi komoditas tanaman pangan.

Namun demikian sebagaimana amanah dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan dapat dipenuhi melalui ketersediaan pangan yang meliputi :

1. Produksi Pangan kaitannya dengan ketersediaan pangan utama;

2. Import, yaitu dengan mendatangkan/supply dari daerah sekitarnya seperti Semarang, Yogyakarta, Boyolali, Kabupaten Magelang, Salatiga, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo;
3. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kota seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Pasal 23, 27,29,31,32; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Permentan Nomor 11 Tahun 2018; Surat Menteri Pertanian Nomor 91/KN.130/M/5/2020 tentang Penguatan Cadangan Pangan Perintah Daerah;
4. Bantuan Pangan baik dari Pemerintah dan swasta.

Lahan pertanian di Kota Magelang perlu untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar terwujud ketahanan pangan dan pelestarian sumber daya alam. Data yang bersumber dari DDA kota Magelang tahun 2020 bahwa total luas tanah per jenis penggunaannya adalah 1.854 Ha dengan luas tanah sawah/wetland seluas 142,89 Ha yang digunakan untuk pengairana teknis. Luas tanah kering/dryland adalah 1.711,11 Ha yang digunakan untuk pekarangan /lahan untuk bangunan dan halaman seluas 1.234,85 Ha, untuk tegal/kebun/ladang/huma seluas 19,32 Ha, kolam/empang/waterpound seluas 5,4 Ha, perkebunan/hutan rakyat/agriculture estates 70 Ha, untuk industri dan lainnya 381,30 Ha. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan jumlah luasan lahan hijau adalah dengan menyusun peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian Kota Magelang akan tetap mempunyai Ruang Terbuka Hijau yang diupayakan untuk membuat lahan pertanian produktif dari lahan milik aset Pemerintah Kota dan dikelola menjadi lahan pertanian abadi.

Salah satu upaya pemanfaatan lahan yang terbatas untuk membangun ketahanan pangan adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pengembangan dan pengoptimalan urban farming dengan memanfaatkan lahan sempit berbasis budidaya organik. Urban farming dengan media air hydroponic sehingga bisa melibatkan budidaya pertanian, peternakan maupun perikanan. Dengan pemanfaatan urban farming dan hydroponic pangan/sayuran yang dihasilkanpun akan lebih sehat. Masyarakat masih banyak yang kurang pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pangan segar yang aman, sehingga tanggung jawab OPD sebertambah dengan harus mengoptimalkan pengaman mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan ketahanan pangan di atas berimplikasi pada penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Implikasi tersebut beberapa diantaranya adalah :

- Perlunya pembinaan dan rekomendasi registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)
- Sarana laboratorium PSAT
- Perlunya kewaspadaan pangan dan gizi
- Perlunya regulasi tentang pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota dan pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Daerah (PP Nomor 17 tahun 2015 tentang ketersediaan cadangan pangan (beras).
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM, pengembangan bahan pangan lokal/pangan alternatif
- Pelatihan Urban Farming pasca panen
- Pembuatan Peta LP2B

2.4 Pertanahan

Indikator kinerja urusan pertanahan melibatkan 2 (dua) program prioritas dan 2 (dua) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Tertib administrasi pertanahan	Tertib administrasi pertanahan	100 %	15 %	30 %	50 %	76,18%	77,91 %	77,91 %	T
2	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan	100 %	15 %	32 %	49 %	70%	77 %	77 %	T

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2020

Pengelolaan pertanahan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk pula dengan perbuatan hukum yang terkait dengan Sumber Daya Alam itu.

Tujuan lain dari diselenggarakannya program pengelolaan pertanahan adalah untuk mewujudkan keteraturan terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan di Indonesia

Tanah yang dikuasai oleh pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, juga untuk pengamanan aset-aset Pemerintah dan sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan/pemanfaatan tanah.

Realisasi pensertifikatan tanah aset pemerintah pada tahun 2020 sejumlah 522 sertifikat dari target total sejumlah 670 sertifikat, dengan capaian kinerja urusan pertanahan dengan indikator tanah yang bersertifikat pada tahun 2020 sebesar 77,91 % dari target 75 %.

Masih banyak permasalahan pensertifikatan aset Pemerintah Kota yang belum bisa tertangani, karena ada kendala dalam pengumpulan kelengkapan administrasi dan pembiayaan pengurusan pensertifikatan tang aset Pemerintah Kota.

Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam *spatial based decision making* untuk terwujudnya *sustainable development* menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN.

Sengketa tanah yang menghabiskan waktu, tenaga, uang dan merusak hubungan baik antar pihak yang berkonflik dapat dicegah dengan pelaksanaan sistem pengelolaan administrasi pertanahan yang sistematis dan melibatkan perangkat desa yang terlatih.

Adapun capaian kinerja urusan pertanahan dengan indikator Tersedianya sistem informasi geografis pertanahan pada tahun sebesar 77 % dari target 77 %.

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Pertanahan di atas berimplikasi pada penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Beberapa indikator masih perlu diupayakan pencapaiannya. Implikasi pencapaian tersebut adalah:

1. Adanya payung hukum yang jelas dalam penganggaran pembiayaan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Magelang
2. Penyederhanaan kelengkapan administrasi pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Magelang yang diperoleh pada pembelian tahun-tahun yang telah berlalu.
3. Mengoptimalkan Pembentukan Gugus Reforma Agraria di tiap daerah. Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sistem informasi geografis pertanahan yang Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.
4. Penguatan data dalam urusan Pertanahan (Neraca Tanah, Ukur Tanah dan lain-lain)

2.5 Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas yang diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Realisasi Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,5	-	62,54	65	67,51	44,52	64,99 %	S
		IKA (Indeks Kualitas Air)	76,84	-	46,47	52	52	16,67	13,01	SR
		Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100 %	-	100	100	100	120	120 %	ST
2.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	IKU (Indeks Kualitas Udara)	79,1	-	86,67	84,91	84,91	83,67	105,78 %	ST
		Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100 %	-	100	100	100	100	100 %	ST
3.	Program Konservasi Sumber Daya Alam	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	49,56	-	57,24	38,22	38,22	31,38	77,30 %	T
		Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4	-	4	4	4	4	100 %	ST
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6	6	6	6	6	6	100 %	ST
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7 m ³	-	289,32	328,32	320,24	199,39	54,14 %	R
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	5,3%	-			8,84	10,58	199,62 %	ST
		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani* (Tujuan 11)	100%	-			91,90	99,66	99,66	ST

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2020

Dari ke 11 (sebelas) indikator, kinerja urusan lingkungan hidup yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 7 (tujuh) indikator capaian kinerjanya sangat tinggi (ST),

1 (satu) indikator capaian kinerjanya tinggi (T), 1 (satu) indikator capaian kinerjanya sedang, 1 (satu) indikator capaian kinerjanya rendah (R) dan 1 (satu) indikator capaiannya sangat rendah (SR).

Satu indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2020 $\geq$ 150% target RPJMD), yaitu:

1. Berkurangnya volume sampah dari sumbernya dengan capaian kinerja sebesar 199.62 %.

Dilihat dari target pengurangan sampah pada target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021, maka target tersebut telah tercapai bahkan lebih. Namun demikian fokus pengurangan sampah dari sumbernya tidak lagi pada target RPJMD 2021 tetapi pada target pengurangan sampah yang telah ditetapkan dalam Jakstrada 2019.

Faktor yang mendorong tingginya capaian kinerja indikator pengurangan sampah dari sumbernya adalah adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah (Pemkot Magelang) dalam menggalakkan pengurangan sampah dari sumbernya melalui berbagai kegiatan seperti kampung organik, bank sampah, pembangun TPST 3 R, pembangunan pusat daur ulang dan kegiatan sekolah Adiwiyata.

Faktor kedua dua (2) yang menjadi pendorong pengurangan sampah dari sumbernya adalah adanya kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Magelang tahun 2019 atau lebih dikenal dengan istilah Jakstrada 2019. Yang mana Jakstrada mengamanatkan adanya pengurangan hingga 30 % pada tahun 2025 atau kurang lebih 25,62 ton/hari. Oleh karena itu dengan bercermin pada capaian kinerja pengurangan sampah pada tahun 2019 yang baru mencapai 8,84 ton/hari, maka dalam kurun waktu 2020-2021, DLH Kota harus kerja keras untuk mewujudkan pengurangan sampah hingga 30 % pada tahun 2025 dengan meningkatkan kinerja dari masing-masing sektor dalam pengurangan sampah pada sumbernya, karena deviasi pengurangan sampah yang masih tinggi yakni kurang lebih 17 ton/hari.

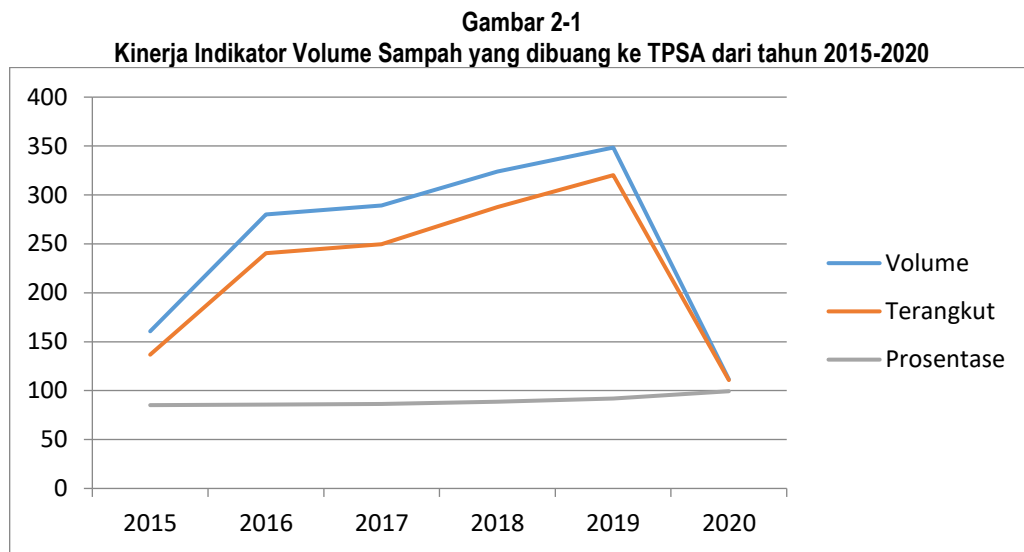
Urusan lingkungan Hidup, yang pada tahun 2020 kinerja IKA mengalami penurunan yang sangat *significant*, yaitu hanya mencapai 13,01 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh minimnya sampel air yang diujikan dilaboratorium akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Untuk masih kinerja indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA, pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2019, yang ditandai dengan volume sampah yang dibuang ke TPSA mengalami penurunan (lihat Gambar 2.1). Dari target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 153,7 m³ terealisasi 199.39 m³, yang berarti kinerjanya 54,14 % sehingga statusnya dari SR pada tahun 2019 menjadi S pada tahun 2020. Berdasarkan capaian kinerja volume yang dibuang ke TPSA, data ini memberikan gambaran bahwa volume sampah Kota Magelang pada tahun 2020 yang dibuang ke TPSA masih melebihi tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 maupun target RPJMD 2021.

Untuk capaian kinerja penanganan sampah perkotaan yang ditangani, hasil kinerja 2019 sangat tinggi yaitu mencapai 102,14%, yang berarti realisasi tahun 2019 melebihi dari target 2019. Namun demikian capaian kinerja ini masih harus ditingkatkan karena belum 100 % sampah Kota Magelang bisa tertangani, yang disebabkan:

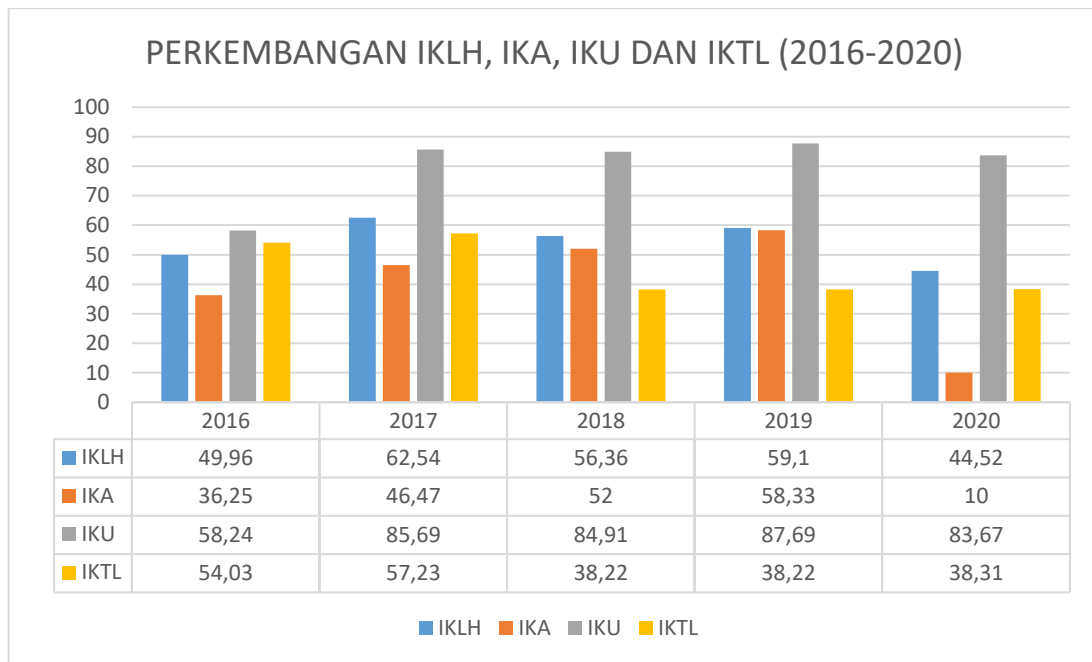
1. Belum semua petugas kebersihan lingkungan (PKL) mematuhi jadwal membuang sampah di depo sehingga seringkali masih ada sisa sampah di depo yang belum terangkut.
2. Belum seluruh SDM angkutan sampah bekerja sesuai SOP
3. Armada angkut sampah masih perlu dimodernisasi dan ditambah jumlahnya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, masih sering ditemukan sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

Kinerja indikator penanganan sampah yang tertangani menunjukkan trend yang terus meningkat dan telah mendekati target 100 %, sebagaimana terlihat dalam Gambar sebagai berikut.



Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu angka indek yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup di Indonesia dan dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan secara nasional dan menjadi acuan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH terdiri dari Indeks pengelolaan air (IPA), Indeks kualitas udara (IKU) dan indek kualitas tutupan lahan (IKTL).

Nilai IKLH juga terkait erat dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2020, yaitu terjaganya kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Angka IKLH Nasional pada tahun 2020 sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 adalah 68,5. Hasil perhitungan IKLH Kota Magelang Tahun 2020 (44.53). Capaian kinerja indikator IKLH tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan semakin menjauh dari target IKLH Nasional, sehingga perlu upaya untuk peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara dan peningkatan kualitas tutupan lahan. Perkembangan IKLH Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam Grafik Perbandingan Nilai IKLH Kota Magelang Tahun 2016 - 2020 (sumber : *Data DLH Kota Magelang(2020)*).



Capaian Kinerja indikator IKLH yang belum tercapai karena dipengaruhi oleh capaian indikator indeks IKA dan IKTL yang belum tercapai 100 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1) Faktor Internal :

Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan seperti perilaku manusia.

- Perilaku BABS di sungai mempengaruhi kualitas air sungai, sehingga parameter *Fecal Coli* dan Total Coliform pada perhitungan IKA tidak dapat memenuhi baku mutu.
- Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah domestik dari aktivitas MCK langsung ke sungai. Penggunaan detergen dalam kegiatan MCK dapat menyebabkan tingginya nilai fosfat pada perhitungan IKA.

2) Faktor eksternal :

Aliran sungai yang melintasi antar batas wilayah administrasi juga mempengaruhi nilai IKLH, khususnya terkait dengan indeks kualitas air. Hal ini disebabkan karena saluran irigasi Kali Manggis dan Kali Bening yang digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air melintasi beberapa wilayah administrasi yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran sungai sudah melewati wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang sebelum melintasi Kota Magelang, sehingga kualitas air saluran irigasi sudah membawa potensi beban pencemar dari kawasan hulu saluran. Maka kualitas air yang diukur di wilayah Kota Magelang juga merupakan akumulasi beban pencemaran dari wilayah sebelumnya.

Guna meningkatkan capaian kinerja DLH dalam penanganan sampah kota, pada tahun 2021-2025 akan memfokuskan pada program lingkungan dan pengelolaan sampah, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan;
2. Meningkatkan kegiatan penanaman pohon;
3. Sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan;
4. Meningkatkan pengawasan dalam pengendalian dampak lingkungan;

5. Penambahan sarana penampungan dan pengangkutan sampah yang bersifat *mobile*, yaitu penempatan *arm roll truck* dilokasi yang potensi timbulan sampahnya tinggi seperti pusat-pusat kuliner, pasar dan pusat-pusat keramaian;
6. Peremajaan, penambahan armada angkut sampah dan sarana pendukungnya seperti alat pengangkat (*loader*) sampah ke atas truk;
7. Meningkatkan kinerja TPST 3 R dalam pengelolaan sampah;
8. Menerbitkan peraturan pemberian sanksi kepada pembuang sampah sembarangan;
9. Terus meningkat sosialisasi program 3 R guna mengurangi timbulan sampah.

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 program dengan 7 indikator. Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 -2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian					Kinerja RKPD Tahun 2020	
									Thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Cakupan penduduk memiliki KTP-el	100%	88,00%	94,34%	96,18%	96,77%	99,79%	99,79%	ST
		Cakupan penduduk memiliki KIA	100%	26,79%	57,84%	76,47%	97,08%	94,26%	94,26%	ST
		Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan	100%	99,99%	#N/A	97,99%	99,98%	100%	100%	ST
		Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	950	873,88	887,35	917,07	926,32	991,81	104,95	ST
		Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	ST
		Persentase kepemilikan Akte kematian	75%	55,01%	79,82%	100,00%	93,51%	100%	133,33%	ST
		Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi	100%	0,00%	#N/A	90,91%	90,91%	118,18%	118,18%	ST

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2020

Dari semua indikator dengan status ST, terdapat 3 indikator yang memiliki status kinerja lebih dari 100% yaitu Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk, Persentase kepemilikan Akte kematian dan Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi. Kondisi ini didukung oleh faktor pendorong seperti :

1. Peluncuran SIBULAN untuk Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk;
2. Persentase kepemilikan Akte kematian dengan kinerja 133,33% disebabkan adanya sistem jemput bola ketika ada laporan kematian dari kelurahan sehingga dapat langsung tercatat oleh dinas dan didukung dengan peluncuran bantuan santunan kematian oleh Pemerintah Kota Magelang;
3. Dukungan terhadap program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menyebabkan peningkatan indikator Terbangunnya sistem pelayanan administrasi terintegrasi.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 6 (enam) program prioritas dengan 12 indikator kinerja, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat	52,94%	70,59%	35,29%	35,29%	58,82%	58,82%	111,11%	ST
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	4	4	4	4	4	4	100%	ST
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	15	9	11	12	13	16	106,67%	ST
		LPM berprestasi								
		Tingkat Kota	64,71%	35%	24%	68,98%	61,64%	76,33%	117,96%	ST
		Tingkat Provinsi	peringkat 1	100%	50%	NA	peringkat 1	NA	NA	-
		Tingkat Nasional	peringkat 1	50%	NA	NA	NA	NA	NA	-
		Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang	70,59%	11,76%	23,53%	47,06%	64,71%	76,47%	108,33%	ST
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	143	143	143	143	143	143	100%	ST
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	100%	53,18%	22,82%	40,94%	60,94%	80,94%	80,94%	T

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif	82,35%	88,24%	100%	100%	100%	100%	121,43%	ST
6	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 terkategori sangat baik, hal tersebut ditandai dari 12 indikator kinerja yang ada terdapat 8 indikator kinerja yang memperoleh predikat capaian sangat tinggi, 1 indikator terkategori tinggi, dan 3 indikator tidak dapat diukur.

Indikator dengan predikat tinggi adalah indikator cakupan pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipasi pembangunan desa, yaitu dengan capaian kinerja sebesar 80,94%. Data sampai dengan tahun 2020 dari seluruh jumlah anggota LPM di Kota Magelang ada sebanyak 425 orang, masih terdapat 81 yang belum memperoleh pelatihan peningkatan kapasitasnya atau Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) baik di tingkat provinsi maupun kota. Penganggaran untuk hal tersebut sebenarnya telah dialokasikan di Tahun 2020 namun tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid 19.

Dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD Tahun 2021 secara agregat kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup 7 (tujuh) program dengan 28 indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2,03	2,03	1,53	0,81	246,91%	ST
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1%	1,75%	2,03	1,75%	NA	4,72%	21,19%	SR
3	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	81%	75,05%	78,63%	78,04%	100%	100%	123,46%	ST
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	81%	62,83%	64,38%	66,05%	69,95%	70,73%	87,32%	T

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2%	3,85%	2,99%	1,99%	NA	0,91%	219,78	ST
6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	15,19%	NA	2,44%	6,47%	9,71%	NA	NA	NA
7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	3%	5,54%	5,01%	4,09%	10,19%	15,42%	19,46%	SR
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81%	78,64%	77,25%	89,23%	74,91%	77,88%	91,15%	ST
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	88%	88,23%	88,28%	88,28%	73,87%	100%	113,64%	ST
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	100%	176,47%	176,47%	152,94%	164,71%	164,71%	164,71%	ST
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	111,76%	111,76%	ST
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	12,078%	12,078%	186,85%	100%	100%	ST
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	30%	100%	100%	100%	100%	100%	333,33%	ST
		Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%	6,52%	7,89%	8,8%	10,13%	11,14%	85,69%	T
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	67%	55,9%	72,61%	60,24%	49,18%	38,97%	58,16%	R
		Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	8%	9,89%	8,99%	2,08%	2,2%	19,76%	40,49%	SR

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	2%	3,85%	2,03%	1,99%	NA	0,19%	1,052.63%	ST
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95%	87,74%	89,23%	90,6%	166,33%	100%	105.26%	ST
		Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	100%	95,25%	96,83%	96,83%	241,29%	100%	100%	ST
		Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%	4,23%	3,25%	1,02%	1,11%	1,23	162.60%	ST
		Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%	0,09%	2,17%	0,58%	0,63%	1,45%	68.96%	S
		Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
		Persentase jumlah keluarga sejahtera	91,06%	85,02%	87,51%	85,82%	69,6%	70,36%	82,76%	T
		Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	75%	25%	100%	100%	100%	100%	133,33%	ST

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Magelang pada tahun 2020 masih perlu upaya yang optimal, hal tersebut tergambar dari 28 indikator kinerja yang ada masih terdapat indikator terkatagori capaian *sedang* 1 (satu) indikator yaitu persentase jumlah keluarga sejahtera (70,36%), 1 (satu) indikator terkatagori *bercapaian rendah* yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri (59,8%), dan 3 (tiga) indikator terkatagori *sangat rendah*, yaitu indikator cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (25,94%), persentase peserta KB yang putus pakai/drop out (19,76%), dan persentase kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun (42,37%).

Tingginya angka PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, angka putus pakai KB (drop out), serta kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain masih adanya Wanita Usia Subur (WUS) yang belum menggunakan kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut (*unmet need*), kurangnya pengetahuan PUS tentang KB, serta kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga karena masih kentalnya budaya yang dipegang teguh oleh pasangan usia subur tersebut. Kedepan agar kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir maka diperlukan upaya antisipatif melalui peningkatan cakupan akseptor KB dalam konteks keterjangkauan, akseptabilitas, ketersediaan dan ketercukupan baik terkait sarana informasi maupun kualitas dan kuantitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB, dan upaya peningkatan kepesertaan atau partisipasi pria khususnya yang terkatagori usia subur untuk ber-KB, disamping perlunya peningkatan determinasi pergerakan di lini lapangan dengan memberdayakan institusi masyarakat terutama petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dan kader KB. Upaya-upaya tersebut diperlukan sebagai sarana optimalisasi kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian target akhir periode RPJMD tahun 2021.

2.9 Perhubungan

Indikator kinerja urusan perhubungan melibatkan 6 (enam) program prioritas dan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pelayanan umum yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan	1	3	5	5	5	5	500%	ST
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	100%	65%	20%	40%	40%	40%	40%	R
		Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata	3	1	1	1	1	1	33,33%	SR
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	100%	45%	55,70%	66,12%	60,11%	100%	100%	ST
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	100%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)	22	17	17	21	21	21	95,45%	ST
3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	9,25%	7,4%	8,40%	8,49%	8,72%	8,83%	95,46%	ST
		Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	100%	5,55%	38,88%	44,44%	61,11%	83,33%	83,33%	T
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	8.136	11.229	8.216	7.021	7.244	4.618	56,76%	R
		Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian	4%	1,86%	4%	4%	7,89%	0%	200%	ST
5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000	2.954.846	3.039.336	2.805.438	2.614.881	2.679.600	92,4%	ST
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara	7	7	7	7	7	7	100%	ST

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2020

Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja urusan perhubungan, terdapat 9 (sembilan) indikator yang capaiannya sangat tinggi, 1 (satu) indikator capaiannya tinggi, 2 (dua) rendah dan 1 (satu) sangat rendah. Namun demikian terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target, yaitu:

1. Jumlah pelayanan umum yang sudah dilaksanakan Dinas Perhubungan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Dinas Perhubungan Kota Magelang berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perhubungan, dalam bentuk pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi:

- a. Pengujian Kendaraan (*Keur*)

Pada saat ini jumlah alat transportasi darat semakin meningkat, maka pengujian kendaraan semakin dibutuhkan untuk menjamin agar setiap kendaraan layak jalan. Pengujian angkutan umum ditujukan agar pengguna angkutan umum merasa aman dan nyaman, sehingga jumlah pengguna angkutan umum akan semakin meningkat.

- b. Perparkiran

Tata kelola parkir di Kota Magelang menjadi tantangan karena bertambahnya jumlah kendaraan tidak diimbangi pertambahan luas lahan parkir yang memadai.

- c. ATCS (*Area Traffic Control System*)

Area Traffic Control System (ACTS) merupakan sebuah sistem pengaturan lalu lintas bersinyal terkoordinasi mencakup satu wilayah secara terpusat. Melalui sistem ATCS penataan siklus lalu lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara *real time* melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan, untuk memperoleh kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.

d. Perizinan Trayek

Angkutan merupakan salah satu faktor penunjang bagi perkembangan bidang perekonomian di Kota Magelang. Dengan adanya izin yg dikeluarkan, kendaraan wajib uji dinyatakan masih layak untuk beroperasi dan aman untuk digunakan oleh pengemudi dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

e. Andalalin

Dinas Perhubungan Kota Magelang telah mengimplementasikan kebijakan Andalalin sebagai syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Disisi lain terdapat 2 (dua) indikator yang masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu:

1. Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik. Pencapaian target indikator ini terkendala karena Pemerintah Kota Magelang sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola terminal angkutan barang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan terminal barang untuk umum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain masalah kewenangan, lahan terminal angkutan barang Kota Magelang yang ada di Cangkuk, Kota Magelang saat ini peruntukannya tidak hanya difungsikan untuk terminal angkutan barang, namun juga dimanfaatkan untuk Samsat Cepat Kota Magelang dan Kantor Unit Patwal Polres Magelang Kota sehingga aktifitas di terminal angkutan barang di Cangkuk, Kota Magelang masih belum maksimal.
2. Jumlah sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata. Keterbatasan kapasitas anggaran menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini. Opsi yang bisa ditempuh pada tahun mendatang adalah pembangunan Terminal Tipe C di lahan Gudang DPU Jalan Urip Sumoharjo, Cangkuk, namun perlu dilaksanakan kajian komprehensif terkait lokasi dan adanya kebijakan eksternal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait rencana pembangunan jalan *Flyover Cangkuk*.

Ditinjau dari target akhir RPJMD, dari 13 indikator urusan perhubungan, 10 indikator diperkirakan akan tercapai pada akhir RPJMD, 1 indikator lainnya perlu upaya keras dan inovasi agar dapat tercapai, sedangkan 2 indikator diperkirakan tidak akan tercapai sampai akhir periode RPJMD. Salah satu indikator yang kemungkinan tidak akan tercapai adalah prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik karena kewenangan terminal angkutan barang merupakan kewenangan pusat. Sedangkan satu indikator lainnya yang kemungkinan besar tidak akan tercapai sampai akhir periode RPJMD adalah Jumlah Sub terminal (Terminal Tipe C) yang tertata. Sampai dengan tahun 2019, jumlah Sub terminal type C di Kota Magelang baru ada 1 buah yaitu terminal Magersari. Pada tahun 2020 dilaksanakan Studi Kelayakan Pembangunan 1 terminal type C dengan opsi lokasi adalah di daerah Cangkuk, di bekas gudang penyimpanan DPUPR.

Sedangkan untuk indikator yang walaupun capaian kinerjanya sudah Sangat Tinggi yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum dan rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk yang kinerjanya Tinggi namun berpotensi

tidak akan dapat tercapai sampai akhir periode RPJMD. Hal ini disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum yang disebabkan rendahnya kualitas layanan angkutan umum disatu sisi, di sisi lain juga semakin meningkatnya pertumbuhan angkutan daring.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan diantaranya:

1. Belum optimalnya layanan uji berkala kendaraan bermotor
2. Manajemen parkir perkotaan belum optimal
3. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
4. Kualitas pelayanan angkutan penumpang umum rendah
5. Peningkatan polusi dan pencemaran udara
6. Masih terjadinya pelanggaran lalu lintas
7. Sarpras lalu lintas yang berkeselamatan masih kurang
8. Masih terjadinya kemacetan lalu lintas, kepadatan dan tundaan atau antrean APILL

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya:

1. Meningkatkan layanan uji kendaraan dan perijinan
2. Meningkatkan tata kelola parkir
3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum
4. Meningkatkan keselamatan lalu lintas
5. Optimalisasi terminal type C Kota Magelang

2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang diukur dengan 13 indikator kinerja. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%	60%	70%	100%	100%	100%	111,11%	ST
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:								
		Radio	60 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	61 kali siar / 5 agama & kepercayaan (100%)	79 kali siar / 3 agama & kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	365 kali siar/ 5 agama dan kepercayaan (100%)	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Media Cetak	12 kali / 5 agama & kepercayaan (100%)	1 kali / 1 agama & kepercayaan (100%)	4 kali / 1 agama & kepercayaan (100%)	6 kali / 3 agama & kepercayaan (100%)	4 kali / 3 agama & kepercayaan (100%)	4 kali / 3 agama dan kepercayaan (100%)	33,33%	SR
		Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3	3	6	6	6	6	200%	ST
		Cakupan KIM (Jumlah KIM)	100% (17)	100% (17)	123,53% (21)	123,53% (21)	123,53% (21)	123,53% (21)	123,53%	ST
		Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	7	6	6	7	7	7	100%	ST
		Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	0	0	0	6	6	6	600%	ST
3	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1	1	4	2	6	0	0%	SR
4	Program sarana dan prasarana bidang teknologi informatika	Interoperabilitas antar system informasi	4	0	2	8	4	4	100%	ST
		Cakupan WAN (Wide Area Network) kota	100%	25,43%	35,84%	63,75%	87,50%	100%	100%	ST
		Cakupan data yang terpusat dan terkendali	100%	25%	50%	69%	100%	100%	100%	ST
		Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 13 indikator urusan Komunikasi dan Informatika mayoritas telah memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2021. Sebanyak 11 indikator (84,62%) mempunyai kinerjanya Sangat Tinggi (ST) dan hanya 2 indikator kinerja (15,38%) memiliki status capaian Sangat Rendah (SR) bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021.

Indikator kinerja dengan status capaian Sangat Rendah (SR) adalah persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak dan jumlah dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. Kendala pencapaian indikator kinerja Sangat Rendah (SR) tersebut adalah :

1. Indikator kinerja persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media cetak. Dari target 12 kali terbit

yang memuat artikel 5 agama dan kepercayaan, hanya mampu tercapai 4 kali penerbitan yang memuat 3 Agama dan kepercayaan yaitu Islam, Katolik dan Nasrani. Kendala penyediaan materi dan informasi keagamaan adalah belum adanya narasumber sebagai penulis artikel keagamaan selain dari tiga agama yang telah disebutkan.

2. Kendala penelitian bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2020 disebabkan tidak adanya penelitian terkait dengan izin pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sehingga dari target 1 penelitian tidak dapat terpenuhi sama sekali (0%)

Ke depan, berkaitan dengan sarana dan prasarana bidang teknologi informatika, perlu adanya upaya pemeliharaan serta peningkatan perluasan jaringan intra pemerintah sehingga cakupan jaringan bisa menjangkau lembaga pendidikan dan fasilitas umum. Kemudian, optimalisasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik dengan pengaktifan fungsi Government Chief Information Officer (GCIO) yang mengharuskan bahwa perencanaan dan pemodelan struktur data harus mengacu pada Dokumen e-Government Interoperability Framework. Sehingga diharapkan format data lebih terstruktur serta metode akses data layanan menjadi seragam. Keadaan ini akan sangat meningkatkan kemudahan integrasi antar sistem layanan.

2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diukur melalui 8 indikator, dengan capaian sampai dengan tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM	7%	94%	23.51%	8.89%	-12.1%	-59.32%	-847.43%	SR
		Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	0%	10.43%	15.17%	12.35%	14.65%	146.5%	ST
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (UMKM)	100	367	79	617	294	214	214%	ST
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	7%	2%	3%	36.72%	42.03%	54.91%	784.43%	ST
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	94%	93.08%	93.15%	93.24%	93.13%	93.25%	99.20%	ST
		Prosentase koperasi sehat terhadap	40%	28.64%	26.45%	27.,46%	29.08%	30.26%	75.65%	T

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		total KSP/USP								
		Jumlah koperasi	235	217	219	222	233	237	100.85%	ST
		Jumlah koperasi syariah	24	12	14	16	18	18	75%	T

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari keempat program prioritas yang di dalamnya memuat 8 (delapan) indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah, terdapat 5 (lima) indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 2 (dua) indikator dengan kinerja tinggi, dan 1 (satu) indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah yaitu:

a. Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM

Kendala yang dihadapi adalah

- pelaku UKM kesulitan pemasaran dengan adanya pandemi Covid -19.
- Masih terbatasnya kemampuan inovasi dan kreativitas, serta kemampuan penguasaan teknologi dalam melakukan pemasaran secara online.
- Minat konsumen lebih cenderung pada barang – barang yang terkait langsung dengan kesehatan sebagai dampak pandemi covid – 19.

Permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UKM antara lain:

- SDM pengelola koperasi kurang profesional
- Rendahnya daya saing UKM dalam kemampuan inovasi dan kreatifitas produk
- Tidak adanya program regenerasi pengurus koperasi yang siap bekerja
- Kurangnya partisipasi anggota koperasi dalam bertransaksi terhadap produk koperasi
- Belum adanya data UMKM yang valid
- Masih rendahnya keahlian pelaku usaha kemampuan management usaha
- Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informasi
- Belum semua pelaku usaha memanfaatkan layanan permodalan dari lembaga keuangan
- Adanya Pandemi Covid-19 baik skala lokal, nasional maupun global.

Solusi permasalahan :

- mengintensifkan ecommerce sebagai sarana pemasaran produk
- meningkatkan kemampuan SDM pelaku koperasi dan UMKM
- meningkatkan daya saing produk antara lain memperbaiki kemasan sesuai standart kemasan produk.

2.12 Penanaman Modal

Kinerja urusan Penanaman Modal diukur melalui 4 indikator, dengan capaian sampai dengan tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	1	2	3	4	5	125%	ST
2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	0%	0.19%	5.90%	16.99%	20.54%	136.93%	ST
		Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	44.78%	68.41%	169.26%	232.07%	312.96%	2086.40%	ST
		Jumlah investor baru	200	63	1.493	1.223	319	226	113%	ST

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Dari 2 (dua) program prioritas dengan 4 (empat) indikator indikator kinerja urusan penanaman modal, terdapat 4 (empat) indikator yang kinerjanya sangat tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

- kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena keterbatasan lahan yang tersedia untuk menarik investor.

Solusi permasalahan :

- Memferifikasi profil investasi daerah yang memang benar – benar layak untuk mendatangkan investor.
- Obyek – obyek investasi benar – benar clean and clear dari segala hambatan yang mungkin timbul ketika ada ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah.
- Dukungan dari para pengampu kepentingan yang saling sinergi sehingga akan benar – benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Tahun					Kinerja Th. 2020 Thd Target RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status	
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan tingkat regional, nasional, dan internasional	7	5	6	7	10	10	142,86%	ST	Disporapar

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Tahun					Kinerja Th. 2020 Thd Target RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status	
		Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional									
		- Peringkat di POPDA SD	3	5	7	4	22	0	NA	NA	Disporapar
		- Peringkat di POPDA SMP	9	19	17	25	27	0	NA	NA	Disporapar
		- Peringkat di POPDA SMA	16	19	22	21	23	0	NA	NA	Disporapar
		- Peringkat di Dulongmas	NA	0	0	0	0	0	NA	NA	Disporapar
		- Peringkat di PORPROV	NA	0	0	16	0	0	NA	NA	Disporapar
		Jumlah klub olah raga	183	183	183	183	183	183	100%	ST	Disporapar
		Jumlah organisasi olah raga	36	35	35	37	37	37	102,78%	ST	Disporapar
2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91,18%	100%	100%	88,24%	87,50%	97,73%	107,18%	ST	Disporapar
		Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional									
		a. Propinsi	8	1	1	368	5	139	1.737,5%	ST	Disporapar
		b. Nasional	1	1	0	80	1	7	100%	ST	Disporapar
3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi	98,00%	118,52%	96,67%	85,29%	100%	90,91%	93,72%	ST	Disporapar
		Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	1	6	1	0	0	0	0%	SR	Disporapar
		Persentase pengangguran pemuda	5,37%	6,20%	6,27%	NA	6,29%	6,25%	85,92%	T	Disporapar
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi	5	0	3	6	2	0	0%	SR	Disporapar
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	89%	65%	65%	68,75%	81,75%	83%	93,26%	ST	Disporapar

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Tahun					Kinerja Th. 2020 Thd Target RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status	
5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kelompok wirausaha pemuda	75	50%	70,59%	NA	0%	81,25%	108,33%	ST	Disporapar
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	2,57%	0,60%	1,19%	NA	2,89%	0%	0%	SR	Disporapar

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan, terdapat sebanyak 10 indikator memperoleh predikat sangat tinggi, dan 8 indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang tidak dapat diukur tersebut dikarena adanya kegiatan-kegiatan di tahun 2020 yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid 19, antara lain: POPDA SD/SMP/SMA, Dulongmas, PORPROV, pemilihan pemuda pelopor, serta sosialisasi P4GN. Sedangkan indicator revitalisasi sarana dan prasarana olahraga tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pendelegasian kewenangan dalam proses pelaksanaanya, baik dalam kontek fisik pekerjaan/konstruksi maupun administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Secara keseluruhan kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2021 telah menunjukan kinerja yang cukup baik.

2.14 Statistik

Kinerja Urusan Statistik di Kota Magelang hingga tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016 -2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian					Kinerja RKPD Tahun 2020	
									Thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	Persentase pemenuhan data statistik	95 %	87,00%	90,99%	97,82%	99,14%	96.25%	101,31%	ST

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2020

Capaian Kinerja Urusan Statistik sudah baik, dengan status capaian ST. Dari target 2020 yaitu persentase pemenuhan data statistik sebesar 95% sudah tercapai 96,25%. Dari jumlah publikasi data yang dibutuhkan sejumlah 347, sudah terpenuhi sebanyak 334 data sektoral.

Kinerja urusan statistik memiliki status ST, sama dengan kinerja terhadap target tahun 2020. Kondisi ini dipastikan dapat tercapai sampai dengan akhir periode RPJMD.

2.15 Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 program dengan 3 indikator kinerja. Kinerja Urusan Persandian tahun 2016 - 2020 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian					Kinerja RKPD Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
									Thd Target RPJMD		
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan SOP persandian	100%	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	ST	Diskominsta
		Tingkat kapasitas SDM persandian	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	ST	Diskominsta
		Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian	100%	0,00%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	SR	Diskominsta

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel capaian indikator program tersebut, dari 3 indikator yang ada, 2 indikator sudah berkinerja ST sedangkan 1 indikator lainnya masih berkinerja SR. Indikator dengan kinerja SR yaitu Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian. Kondisi ini dikarenakan hanya 1 OPD yang menerapkan SOP Persandian. Hal ini terjadi karena urusan Persandian yang bersifat rahasia, maka hanya dilaksanakan oleh 1 OPD sehingga SOP persandian hanya dilaksanakan oleh 1 OPD dimaksud saja.

2.16 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan terdiri dari 4 program dengan 15 indikator kinerja. Kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Tahun					Kinerja Tahun 2020 thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	89,74%	85,37%	100%	100%	ST
		Jumlah pengunjung museum	5.600	5.050	10.769	6.118	1.557	982	17,54%	SR
		Jumlah koleksi museum	15	65	65	65	65	65	433,33%	ST
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	16,67%	14,29%	15,18%	14,29%	22,32%	15,63%	93,76%	ST
		Jumlah festival seni dan budaya.	14	10	12	8	9	5	36,71%	SR

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian Tahun					Kinerja Tahun 2020 thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
		Cakupan gelar seni 75%	100%	83,33%	91,67%	75%	33,33%	75%	75%	S
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	230	224	224	224	224	224	97,39%	ST
		Misi kesenian 100%	50%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	SR
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah gedung kesenian	2	1	1	1	1	1	50%	SR
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	15	10	11	11	11	14	93,33%	ST
		Cakupan kajian seni 50%	80%	53,33%	66,67%	66,67%	50%	53,33%	66,66%	S
		Cakupan fasilitas seni 30%	45%	42,86%	100%	71,43%	100%	42,86%	95,24%	ST
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	80%	75%	100%	75%	30%	75%	93,75%	ST
		Cakupan tempat 100%	100%	90,91%	100%	81,82%	18,18%	50%	50%	SR
		Cakupan organisasi 34%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	SR

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator program tersebut, dari 15 indikator masih terdapat 7 indikator dengan kinerja status ST, 2 indikator dengan kinerja status S, dan 6 indikator dengan status capaian SR. Indikator dengan capaian sedang dan sangat rendah sebagian besar mengalami kendala pencapaian karena adanya pembatasan kegiatan yang menimbulkan potensi kerumunan sebagai salah satu antisipasi penyebaran covid-19.

Peniadaan pertunjukan seni dan budaya berpengaruh pada indikator (a) Jumlah festival seni dan budaya, (b) Cakupan gelar seni, dan (c) Misi kesenian. Untuk kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Jumlah pengunjung museum adalah penutupan museum (Museum Sudirman) selama 7 bulan. Hal ini dilakukan karena adanya pandemi covid-19, sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan.

Indikator Jumlah gedung kesenian dan cakupan tempat memiliki kinerja sangat rendah karena belum dianggarkan pembangunan gedung kesenian pada tahun 2020. Pembangunan gedung ini direncanakan di tahun 2021 yaitu dengan pembangunan rumah budaya. Cakupan kajian seni dilakukan terbatas dikarenakan pandemi covid-19. Dari total 15 jenis kegiatan, hanya bisa dilaksanakan 8 jenis kegiatan karena beberapa kegiatan kajian seni berpotensi menimbulkan kerumunan. Sedangkan untuk cakupan organisasi hanya ada 1 organisasi struktural yang menangani kesenian karena Dewan Kesenian yang ada sedang tidak aktif.

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang, beberapa upaya diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja urusan kebudayaan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana museum dan kesenian, dan
2. Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya

2.17 Perpustakaan

Indikator kinerja urusan perpustakaan melibatkan 6 (enam) indikator dengan capaian realisasi indikator kinerja terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Capaian					Kinerja RKPd Thd target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Persentase peningkatan judul buku	15,99%	-	11,15%	5,83%	23,58%	29,76%	186.11%	ST
		Persentase peningkatan jumlah buku	9,89%	-	14,43%	6,31%	28,44%	37.16%	375.73%	ST
		Persentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	66,35%	-	47,73%	52,27%	56,82%	61.93%	93.33%	ST
		Persentase perpustakaan aktif	28,44%	14,24 %	18,99%	21,52%	24,05%	26.58%	96.46%	ST
		Cakupan pelayanan melalui e-library	5 %	-	-	-	6,25 %	6.25%	125%	ST
		Peningkatan promosi layanan perpustakaan	25 %	-	71,62%	41,51 %	127,27 %	0%	0%	SR

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2020

Dari keenam indikator kinerja urusan perpustakaan, terdapat 5 (lima) indikator yang kinerjanya **Sangat Tinggi (ST)** dan 1 (satu) indikator kinerja **Sangat Rendah (SR)** jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator sangat rendah yaitu indikator peningkatan promosi layanan perpustakaan. Capaian realisasi 0% dikarenakan jumlah event pameran yang direncanakan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID 19.

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2020 $\geq 150\%$ target RPJMD). Indikator tersebut antara lain: Persentase peningkatan judul buku sebesar 241,67 % dan Persentase peningkatan jumlah buku sebesar 460,22%. Pencapaian tersebut karena tingginya partisipasi beberapa pihak berupa sumbangan buku dari baik bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penerbit buku maupun sumbangan dari masyarakat. Hal ini sangat membantu strategi Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan Magelang sebagai Kota Jasa terutama bidang Pendidikan.

2.18 Kearsipan

Indikator kinerja urusan kearsipan melibatkan 8 (delapan) indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Capaian					Kinerja RKPD thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana prasarana arsip yang terpelihara	89%	-	40%	50%	100%	76.92%	86.42%	T
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan akses arsip	82%	-	104.29%	91.94%	97.56%	89%	112.91%	ST
		Tingkat kompetensi SDM pengelola kearsipan	67%	-	67.2%	73.6%	70.42%	59.15%	88.28%	T
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku	100%	-	34.48%	44.83%	72.41%	89.66%	89.66%	T
		Persentase arsip dan risalah	85%	-	-	-	-	-	0%	SR
		Persentase penyelamatan arsip	73%	-	47%	53.33%	60.31%	67.24%	92.10%	ST
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase implementasi e-arsip	100%	-	-	43.64%	69.09%	74.07%	74.07%	S
		Persentase ketersediaan sarpras arsip	60%	-	-	30%	30%	28.26%	47.10%	SR

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2020

Dari kedelapan indikator kinerja urusan perpustakaan, terdapat 2 (dua) indikator yang kinerjanya **Sangat Tinggi (ST)**, 3 (tiga) indikator yang kinerjanya **Tinggi (T)**, 1 (satu) indikator yang kinerjanya **Sedang(S)**, dan 2 (satu) indikator kinerja **Sangat Rendah (SR)**, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator tersebut yaitu:

a. Persentase Implementasi e-arsip

Realisasi capaian indikator ini masih dalam kategori sedang jika dibanding dengan target di RPJM. Dari total 54 unit kerja yang ada yang terdiri dari OPD dan kelurahan, tercatat 40 unit kerja yang bisa menerapkan e-arsip. Kendala operasional di OPD inilah yang menyebabkan target RPJM sebesar 100 % masih belum tercapai, realisasi di akhir tahun 2020 baru mencapai 74.07%

b. Persentase Ketersediaan Sarpras Kearsipan

Dari target 60 % di RPJM baru tercapai 28.26 %. Realisasi capaian indikator ini termasuk dalam kategori sangat rendah, dikarenakan baru 13 sarpras kearsipan yang sudah tersedia dari total keseluruhan sarpras yang seharusnya

ada yakni 46 sarpras kearsipan. Hal ini tidak luput dari dampak pandemi di tahun 2020 yang mengakibatkan anggaran di tahun ini mengalami re focusing, sehingga tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

c. Persentase arsip dan risalah

Capaian pada indikator ini tidak dapat diperhitungkan mengingat lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap capaian target indikator tersebut. Hal ini dikarenakan terjadi permasalahan antara perangkat daerah pengampu urusan kearsipan dan perangkat daerah yang mendokumentasikan risalah serta ketidakjelasan tentang definisi operasional yang dimaksud dengan risalah tersebut. Inilah yang menyebabkan capaian indikator persentase arsip dan risalah masuk kedalam kategori sangat rendah.

3 URUSAN PILIHAN

3.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan indikator kinerja urusan yang melibatkan 6 (enam) indikator dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Stat us
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP /Srtifikat Kelayakan Pengolahan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	ST
		Jumlah pengolahan ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	6	1	2	3	4	5	83,33%	T
2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Ikan Perikanan produksi	167,83	158,90	160,65	162,41	164,02	166,01	98,91%	ST
		Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00 %	100%	ST
		Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB	70,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	85,71%	T
3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Luas lahan perikanan organik	0,6	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	83,33%	T

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2020

Dari 6 (keenam) indikator kinerja urusan Perikanan dan Kelautan terdapat indikator, yang kesemuanya caipaiannya sudah bagus (tinggi), 2 (dua) indikator capaiannya Sangat Tinggi (ST) yaitu indikator persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan indikator Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya capainnya juga bagus yaitu tinggi (T) .

Indikator Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP (Srtifikat Kelayakan Pengolahan) capaiannya sangat tinggi, yaitu tersertifikasinya 1 (satu) Unit Pengolahan Ikan. Sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) harus memenuhi GMP (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP) unit pengolahan ikan ditahun 2020 adalah Sentra Pengolahan Ikan Tidar Utara. Syarat yang harus dipenuhi untuk pencapaian target ini adalah : I). Sarana prasarana peralatan pengolahan ikan secara higienis masih terbatas; II/. Dibutuhkan anggaran untuk rehabilitasi instalasi sanitasi/IPAL III). Persyaratan administrasi: yang harus dipersiapkan Dokumen UKL=UPL; Dokumen GMP=SSOP/Hasil Uji Lab Mikrobiologis/Hasil uji Mutu Produk; IV) Produksi olahan SPI : 249,9 ton/th.

Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar capaiannya tinggi, yaitu dari total 6(enam) yang ditargetkan, bisa tercapai 5 (lima) unit pengolahan ikan yang ada di masyarakat. Keenam unit pengolahan ikan tersebut adalah : 1). Bandeng Magelangan/Potrobangsari; 2) Krupuk Ikan Gajah Super/Gelangan; 3) Bonikan/Jurangombo Utara; 4). Bandeng Kinanti/Kedungsari; 5) Bakso Ikan Mak Yus/Potrobangsari; 6). Sambel Ikan/Magelang.

Jumlah produksi ikan capaiannya sangat tinggi yaitu 164,02 ton/tahun. Dari yang ditargetkan, kesemuanya bisa tercapai 100%. Namun demikian tingginya jumlah produksi ikan belum bisamemenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kota Magelang, hal tersebut seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Ketersediaan Produksi Ikan dan Konsumsi Ikan Penduduk Kota Magelang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan (TON)	163,36	153,01	152,44	164,02	165,86
2	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/th)	21,65	22,5	23,3	24,36	24,5

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa produksi ikan di kota magelang masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan penduduk Kota Magelang, keterbatasan lahan kolam, diatasi dengan memanfaatkan teknologi budidaya perikanan di lahan sempit/kolam terpal/kolam fiber/dengan padat tebar tinggi menjadi kendala dalam meningkatkan produksi ikan, sehingga masih perlu melaksanakan upaya-upaya yang bisa menambah jumlah produksi ikan

Indikator Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) target dan capaiannya tidak terlalu tinggi. Kota Magelang mempunyai 2 unit pembenihan ikan (Unit Pembenihan Rakyat/UPR yang bersertifikat CPIB yaitu BBI Jurangombo dan BBI Potrobangsari yang keduanya terkendala untuk mencapai sertifikasi CPIB, dikarenakan 1). Adanya pengurangan sarana pendukung utama sertifikasi berupa: kolam pengendapan/filter, kolam pendederan/kolam Induk/kolam instalasi IPAL; 2) Perbaikan Sarana Prasarana Fisk yang merupakan faktor utama Sertifikasi CPIB belum dapat dilaksanakan. Sehingga perlu diupayakan beberapa hal yaitu diantaranya : i). Persiapan Administrasi terkait Sertifikasi CPIB berupa: Permohonan/sertifikat MPM/ijin usaha perikanan/data umum BBI/struktur organisasi tanggungjawab dan wewenang/Alur proses produksi/Sarpras/SDM/dokumen; II). Persiapan Fisk : Belum ada alokasi anggaran; III) PAD dari Penjualan Benih Ikan Th 2020 : Rp. 29.335.000,- (97,78% dari target).

Persentase unit pembenihan ikan/ Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang telah bersertifikasi CBIB (cara Budidaya Ikan yang Baik) targetnya sudah tercapai. Ada 6 (enam) Pokdakan yang bersertifikat CBIB dari Dirjen Perikanan

Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan, yaitu : 1). Pokdakan Argo Mino/Kramat Utara; 2). Mina Rahayu/Gelangan, 3). Mina Jaya Mandiri/Panjang; 4). Mina Enggal Makmur/Potrobangsang; 5). Tidar Manfaat Barokah/Tidar Utara; 6). Nusa Indah 3/Jurangombo Utara.



Luas lahan perikanan dari target seluas 0,5 Km² tercaai seluas 0,45 km². Dimana luasan tersebut tersebar di beberapa wilayah keluarahan yaitu Tidar Selatan/Tidar Utara/Jurangombo Selatan/Panjang/Wates/Potrobangsang/Kramat Utara/Kramat selatan/Kedungsari. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan : I). Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan/kolam yang ada untuk budidaya perikanan secara organik; II) menggunakan teknologi budidaya perikanan RAS/Bioflok/dll yang ramah lingkungan

Permasalahan yang masih harus diselesaikan Urusan Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut :

- a. Semakin berkurangnya lahan perikanan karena beralih fungsi untuk permukiman
- b. Tumpang tindih pemanfaatan sebagian balai benih ikan sebagai TPST Bojong sehingga tidak dapat berfungsi optimal, lahan berkurang sepertiga, mengganggu produktivitas, menghilangkan kantor BPP, di Jurangombo ada lahan sebagai opsi untuk dapat dimanfaatkan
- c. Kompetensi, pengetahuan dan ketrampilan pelaku perikanan masih rendah

Implikasi permasalahan kelautan dan perikanan pada penyusunan dokumen perencanaan kedepan antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan/kolam yang ada untuk budidaya perikanan secara organik;
- Menggunakan teknologi budidaya perikanan RAS/Bioflok/dll yang ramah lingkungan
- Pengembangan Kapasitas pembudidaya ikan kecil
- Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil
- Fasilitasi pembentukan koperasi untuk pokdakan
- Fasilitasi akses permodalan
- Rehab BBI
- Pelatihan teknologi budidaya perikanan

Bantuan peralatandan saprodi budidaya perikanan

3.2 Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian diukur melalui 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang masuk dalam 10 program dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut. :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016 – 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV	4,24%	1,82%	1,82%	2,42%	3,03%	3,63%	85,61%	T
2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP	52,94%	0,00%	5,88%	11,76%	23,53%	35,29%	66,66%	S
		Rasio petani terlatih	90,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	100%	ST
3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase hewan sehat	87,00%	81,00%	83,00%	83,00%	85,00%	85,00%	97,70%	ST
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang	8	3	4	5	6	7	87,5%	T
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP	10,00%	0,00%	1,00%	3,00%	6,00%	9,00%	90%	T
		Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian	13	9	10	11	13	13	100%	ST
6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal	4,24%	1,82%	1,82%	2,42%	3,03%	3,63%	85,61%	T
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Luas lahan pertanian organik	1,14	0	0,94	0,98	1,03	1,08	94,73%	ST
		Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian	72,00%	36,60%	45,00%	51,70%	58,50%	65,30%	90,69%	ST
8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan organik:	15	0	3	6	9	12	80%	T

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Rasio peternak terlatih	90,00%	80,00%	85,00%	85,00	85,00%	85,00%	94,44%	ST
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Daging Ruminansia	1.401.690	1.121.350	1.177.418	1.233.486	1.289.554	1.345.622	95,99%	ST
		Daging Unggas	5.660.315	4.878.650	5.122.583	5.366.516	5.610.449	5.635.382	99,56%	ST
		Telur	500.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000	96%	ST
		Susu	209.000	190.000	193.800	197.600	201.400	205.200	98,18%	ST
10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Padi	3.120	3.221,12	3.201	3.180	3.160	3.140	100,64%	ST
		Jagung	11	11	11	11	11	11	100%	ST
		Ubi kayu	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	100%	ST

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2020

Dari ke-10 Program prioritas dalam urusan pertanian yang memuat 19 indikator kinerja, terdapat 13 (tiga belas) indikator dengan capaian Sangat Tinggi (ST), 3 (tiga) indikator capaiannya Tinggi (T), 2 (dua) indikator capaiannya Sedang (S), dan 1 (satu) indikator capaiannya Rendah (R). Dalam penyelenggaraan urusan pertanian terdapat 1 (satu) indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (realisasi 2020 $\geq$ 150% target RPJMD), yaitu: Prosentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal, dari target sebesar 3,63% pada Tahun 2020 tercapai jauh melampaui target sebesar 6,06%, atau mencapai 166,96%.

Meskipun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sangat baik namun perlu diperhatikan namun perlu diperhatikan bahwa hal tersebut belum menunjukkan kondisi ideal. Sebagai contoh persentase Petani yang melaksanakan GAP dan GHP serta unit usaha peternakan yang telah bersertifikat halal masih di bawah 10%. Pada tahun mendatang capaian ini harus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern. Selain itu produk pertanian yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (swasembada pangan).Dihadapkan dengan target akhir RPJMD, dari 19 indikator, 13 indikator diperkirakan akan dapat tercapai, 2 (dua) indikator perlu upaya untuk mencapai target akhir, sedangkan 1 (satu) dikator perlu upaya keras dan inovatif untuk dapat mencapai target akhir yaitu prosentase petani yang melaksanakan GAP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan Pertanian diantaranya:

1. Pengembangan tanaman hias/ anggrek belum optimal.
Terbatasnya tempat, kondisi geografis dan kurangnya sarana prasarana.
2. Belum optimalnya praktik GAP dan GHP oleh petani.
Mindset petani yang menolak teknologi pertanian.
3. Tidak tercapainya target produksi padi.

Alih fungsi lahan, banyak lahan yang dikeringkan (tidak ditanami), masa tanam mundur.

4. Semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi.

Kurang menariknya sektor pertanian dan harga jual tanah yg menggiurkan.

5. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pertanian baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Sulit mencari petani penggarap. Petani sdh banyak yg tua dan meninggal, yg muda tidak tertarik sektor pertanian.

6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

- Jalan menuju lokasi area persawahan kurang lebar sehingga alsintan sulit mencapai lokasi JALUT -- terkendala status fasum;
- Rehabilitasi JITU terkendala status fasum;
- Akses bantuan terbatas karena luasan lahan yg terbatas
- Penerapan pemupukan belum berimbang (masih banyak penggunaan pupuk kimia), semakin tingginya

7. Perlu adanya peninjauan kembali terkait penamaan Kebun Bibit Senopati (KBS) karena secara fungsi sudah lebih bergeser ke arah display taman dan ruang rekreasi.

Terbatasnya ruang/space untuk kegiatan pembibitan/pembiakan tanaman sehingga perlu ketersediaan space tersendiri untuk area perbanyakan tanaman (kebun bibit yang semestinya).

8. Perlu adanya pengamanan terhadap alsintan.

tidak ada bengkel alsintan, petani kurang merawat alsintan, tidak ada gudang penyimpanan alsintan, kondisi sosial ekonomi budaya dan pengetahuan petani mengenai alsintan terbatas.

9. Alih fungsi gedung BPP Handayani tahun 2018 akibat dampak pembangunan akses jalan menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), memerlukan solusi gedung dan lahan BPP pengganti yang representatif sehingga aktivitas kegiatan penyuluhan pertanian di Kota Magelang dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai pusat kegiatan Kostratani yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Pertanian.

Sampai saat ini masih belum ada gedung BPP dan lahan pengganti yang representatif sehingga peran BPP sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat kegiatan penyuluhan pertanian berbasis Kostratani dan sebagai rumah bagi para pejabat fungsional rumpun ilmu hayat (Penyuluh Pertanian, PMHP, Medik Veteriner) dan petani tidak optimal. Selain itu ketiadaan BPP menyebabkan koordinasi vertikal khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Teknis Provinsi berjalan kurang sesuai harapan.

Sedangkan permasalahan dalam pembangunan urusan Peternakan adalah:

1. Penjualan babi dengan sapi dan ayam saat ini masih menjadi satu

- Saran dari MUI, jangan menjadi satu, bila tidak dipindah sertifikat halal akan dicabut.
- RPH milik pemerintah wajib memiliki sertifikat halal, masa berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan;
- Struktur dan tata letak bangunan posisi ruang pemotongan babi berada diatas pemotongan sapi, secara teknis tidak dibenarkan karena limbah babi akan mencemari ruang pemotongan sapi yang posisi berada dibawah;
- Tempat pemotongan babi masih bisa dilaksanakan di RPH selama ada pembatas pagar dan aktifitas terjaga higienes;
- Menjaga adanya pemotongan diluar RPH diperlukan bangunan RPH/TPH babi baru yang khusus;
- Perlu kajian terlebih dahulu untuk relokasi RPH babi.

2. Perlunya penguatan tanggul di atas RPH agar tidak longsor dan di samping gedung kantor RPH serta pengaspalan jalan masuk ke RPH.

- Tanggul/talud jalan menuju RPH longsor akibat hujan deras sepanjang hari yang mengakibatkan aktifitas mobil pembawa sapi terganggu dan rawan kecelakaan/terperosok menabrak bangunan kantor RPH;
 - Perlu segera dibangun tanggul/talud pembatas bangunan RPH dengan jalan masuk.
 - perlu pengaspalan jalan dalam lingkungan RPH
3. Belum berfungsinya pengelolaan limbah di RPH agar tidak mencemari Sungai Elo, selama ini kerjasama membuang limbah dengan DLH.
- Perlu dioptimalkan sumberdaya yang ada dan perbaikan fungsi pengelolaan limbah kotoran RPH, baik kelancaran saluran dan sedimennya.
4. Masih adanya penyakit hewan menular dan zoonosis.
- Perlu adanya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis.
5. Masih adanya peredaran daging dan produk hewan yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
- Perlu adanya kegiatan pengawasan dan penertiban penjualan daging dan produk hewan yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
6. Kawat bronjong di sepanjang sungai Elo yang merupakan pengaman gedung RPH perlu direhabilitasi karena sudah banyak yang rusak dan batu-batu dalam kawat bronjong banyak yang hilang terbawa arus sungai. Bila memungkinkan kawat bronjong diganti dengan talud, namun Daerah aliran sungai merupakan kewenangan lembaga pengelola DAS.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

1. Pengembangan pertanian organik;
2. Pengembangan peternakan organik;
3. Pengembangan urban farming;
4. Optimalisasi lahan sempit;
5. Meningkatkan nilai ekonomi usaha pertanian dan peternakan.
6. Rehabilitasi dan revitalisasi RPH agar dapat dapat berfungsi secara optimal dan dapat tetap mempertahankan sertifikat halal

3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral melibatkan 1 (satu) indikator kinerja daerah dengan target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2020

No.	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d. 2021	Capaian					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU)	71,89%	60,39%	62,11%	62,11%	64,61%	65,74%	91,45%	ST

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2020

Kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang diukur dengan indikator rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum (PJU), capaian kinerjanya sangat tinggi (ST), dengan capaian 95,28%. Jumlah titik Penerangan Jalan umum (PJU) pada tahun 2020 telah mencapai 5.745 buah, meningkat 104 buah dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.641 buah.

Permintaan masyarakat terhadap pemasangan lampu PJU melalui proses musrenbang dari tahun ke tahun cukup tinggi, namun terbatas yang bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan permasalahan teknis. Oleh karena timpangnya permintaan dan kesanggupan pemasangan PJU ini, maka di beberapa wilayah ada masyarakat yang memasang lampu penerangan jalan secara swadaya, tetapi daya listriknya disambungkan secara illegal ke PJU terdekat.

Dihadapkan dengan target akhir periode RPJMD, indikator urusan energi dan sumber daya mineral yaitu rasio ketercukupan Penerangan Jalan Umum diperkirakan akan dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2022 adalah:

1. Pemenuhan PJU bagi masyarakat
2. Pengembangan energi alternative/ terbarukan untuk PJU

3.4 Perdagangan

Kinerja urusan Perdagangan diukur melalui 10 indikator, dengan capaian pada tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan PKL yang dibina	16 %	18.52 %	59.63%	59.63 %	76.16%	95.23%	595.19 %	ST
		Jumlah shelter PKL yang dikelola	17	16	19	18	19	19	118.75 %	ST
2	Program Pengelolaan Pasar	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	54%	53.85%	83.33%	100 %	120%	160%	296.30 %	ST
		Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	40 %	50.79%	7.14 %	23.21%	10.79%	107.9%	ST
		Cakupan pedagang pasar yang dibina	16%	6.76 %	10.14%	10.44 %	18.93%	57.78%	361.13 %	ST
		Persentase pasar tradisional yang dikelola	80%	80 %	75%	80 %	80%	80%	100%	ST
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor produk ke LN	US\$1.250.000	US\$ 860.125.5	US\$ 1.950.541	US\$ 2.308.905.97	US\$ 2.308.905.97	US\$ 2.423.087	193.85 %	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah	7 %	2 %	11.22%	13.96 %	20.81%	24.97%	356.71 %	ST
5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera	3.100	2.600	3.712	4.267	7.921	6.348	204.77 %	ST
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design	60 %	20 %	20%	20 %	40%	40%	66,67%	S

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari keenam program prioritas yang di dalamnya memuat 10 (sepuluh) indikator kinerja urusan Perdagangan, 9 (sembilan) indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja sedang, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator kinerja sedang yaitu :

- Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design
kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini terkait langsung dengan Refocusing anggaran sehingga tidak dapat menambah sarpras universal design di pasar yang lain yaitu pasar kebon polo

Namun demikian tetap ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

- Pertumbuhan PKL yang sulit dikendalikan dan jumlah shelter PKL yang melebihi target yang ditetapkan sehingga menimbulkan dampak keindahan tata ruang kota
- Kurangnya penegakan ketertiban PKL
- Informasi data ekspor dari pelaku ekspor tidak secara rutin melaporkan ke dinas perindustrian dan perdagangan.
- Pasar tradisional kurang dapat bersaing dengan pasar modern

Solusi permasalahan :

- membatasi pertumbuhan PKL maupun pertumbuhan Shelter PKL.
- meningkatkan penegakan ketertiban PKL
- meningkatkan komunikasi kepada pelaku ekspor
- meningkatkan sarana dan prasana pasar tradisional sesuai universal design

3.5 Perindustrian

Kinerja urusan Perindustrian diukur melalui 4 indikator, dengan capaian sampai dengan Tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016 -2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,3 %	4,12 %	5.78%	3.16 %	135.12%	-58.51%	-1773.03%	SR
2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	15	10	11	12	13	13	86.67%	T
3	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,30%	4,21 %	4.52%	4,83%	6.49%	4,44%	963.72%	ST
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,29%	5.02%	5.16%	5.48%	5.19%	5,33%	100.76%	ST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

Dari 4 (empat) program prioritas yang di dalamnya memuat 4 (empat) indikator kinerja urusan Perindustrian , 3 (tiga) indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan terdapat 1 (satu) indikator dengan nilai capaian sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD. Kendala pencapaian indikator sangat rendah yaitu :

a. Peningkatan daya saing IKM Formal

kendala yang dihadapi pelaku IKM sangat terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak pelaku IKM mengalami penurunan omset secara signifikan, mulai dari kesulitan memperoleh bahan baku, proses produksi dan pemasaran hasil produksi yang saling terkait semua terdampak Pandemi Covid – 19. nilai produksi tahun 2019 sebesar Rp 49.036.888.150,00 yang diharapkan pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 50.630.587.000,00 namun sampai dengan akhir tahun 2020 realisasinya hanya sebesar Rp 20.346.428.920,00

beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

- masih rendahnya daya saing produk IKM kota magelang dalam menghadapi dampak globalisasi, terutama terkait inovasi dan diversifikasi produk, promosi dan pemasaran.
- Adanya Pandemi Covid-19 secara lokal, nasional dan global
- Mentalitas pelaku IKM yang kurang mandiri
- penguasaan teknologi produksi masih rendah khususnya packaging kemasan produk

Solusi permasalahan :

- Melakukan pembinaan intensif kepada para pelaku industry kota magelang meliputi inovasi dan diversifikasi produk, promosi dan pemasaran serta pembinaan mental management usaha pelaku IKM dalam berusaha. agar produk yang dihasilkan lebih memiliki daya saing di pasar baik regional maupun nasional.
- melakukan inovasi E-Commerce guna memperluas jaringan pemasaran maupun untuk memperoleh bahan baku produksi.

3.6 Transmigrasi

Kinerja urusan Transmigrasi diukur melalui 2 indikator, dengan capaian sampai dengan tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target Indikator Realisasi Pencapaian Urusan Ketransmigrasian Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	100 %	100%	75%	0%	0%	0 %	0 %	SR
2	Program Transmigrasi Regional	Persentase masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	100 %	100%	100%	0%	0%	0%	0%	SR

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2020

Dari 2 (dua) program prioritas yang di dalamnya memuat 2 (dua) indikator kinerja urusan Transmigrasi menunjukkan nilai capaian sangat rendah. Upaya penangan urusan ini dilakukan dengan 3(tiga) cara yaitu 1. pengarahan calon transmigran ; 2.sosialisasi potensi lokal daerah tempat tujuan transmigrasi; 3. fasilitasi penempatan trasmigrasi. dengan melaksanakan ketiga kegiatan tersebut maka diharapkan capaian indikator tersebut dapat tercapai namun demikian untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus menunggu alokasi jumlah transmigran yang ditempatkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian Transmigrasi.

4 URUSAN PENUNJANG

4.1 Fungsi Lain-lain

Fungsi penunjang lain lain melibatkan 27 indikator dan 9 program. Capaian indikator Fungsi ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penunjang Fungsi Lain Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Program Mengintensifkan penanganan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
	pengaduan masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	78%	56.86%	68.92%	95.18%	100%	101,45%	130%	ST
2.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi SIPID (Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	0.00%	20%	85.71%	100%	100%	100%	ST
		Implementasi pemanfaatan SPIPISE	100%	60%	100%	100%	100%	111,11%	111,11%	ST
3.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100 %	100%	100%	100%	100%	0%	∞	ST
4.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah review PERDA/PERWAL	3	0	1	4	6	1	400%	ST
		Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi	3	1	1	2	3	1	233%	ST
		Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS	1	0	0	1	0	5	600%	ST
5.	Program pengelolaan barang milik daerah	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang	80%	53.53%	74.36%	75.24%	76.18%	111,3%	139%	ST
		Barang milik daerah yang didayagunakan	100%	135	135	135	129	100%	100%	ST
		Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu	100%	97.83%	100%	96.55%	100%	100%	100%	ST
		Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu	100%	97.83%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
6.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
7.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu	100%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	ST
8.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	100%	88.71%	83.33%	100%	100%	100%	100%	ST
9.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	55%	80%	56.29%	56.29%	63.69%	N/A	116%	ST
		Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review	100%	80%	100%	85.71%	100%	N/A	100%	ST
		Persentase zona integritas yang terbentuk	50%	0%	10.34%	10.34%	10.34%	N/A	20%	SR
		Nilai hasil LKJip SKPD	B	CC	CC	B	B	0		ST
		Persentase SKPD yang direview LKJip	75%	26.08%	58.62%	62.07%	75.86%	132,63%	177%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d. 2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	97.65%	88.73%	85.24%	93.07%	N/A	97.96%	ST
		Temuan ketidak patuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	5%	45.45%	114.29%	50%	19.23%	N/A	385%	ST
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100%	49.42%	88.73%	46.02%	95.45%	N/A	95.45%	ST
		Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal	100%	100%	100%	100%	92.8%	N/A	92.8%	ST
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	60.39%	86.36%	91.39%	83.44%	112,55%	132.4%	ST
		persentase SPM yang mencapai target nasional	85%	70%	86.09%	80%	75.86%	101,15%	119%	ST
		Tingkat pemahaman tentang SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	0%	∞	

Dari 9 program dan 27 indikator yang tergambar dalam tabel di atas, 8 program memiliki capaian kinerja sangat tinggi sedang 1 program yang lain masih menyisakan capaian kinerja Sangat Rendah. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dari 3 indikator, masih terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sangat rendah yaitu indikator Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang investasi. Indikator ini baru menghasilkan 1 RAPERWAL baru tentang investasi dari 2 yang ditargetkan. Raperwal tersebut telah menjadi PERWAL No. 9 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Indikator selanjutnya adalah Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS yang sama sekali belum ada capaian. Indikator tersebut akan segera dipenuhi dalam tahun 2021.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan fungsi lain diantaranya

1. Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
2. Manajemen pengelolaan asset yang belum optimal, meliputi: SDM yang belum kapabel, data asset yang kurang akurat dan lain-lain;
3. Meskipun semua aparat pengamud telah pemahaman SAKIP, namun dari sisi kualitas masih belum memadai. Sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dokumen SAKIP;
4. Zona integritas sudah dicanangkan sejak 26 Mei 2014, namun hingga saat ini masih belum terbentuk indikator dari zona integritas seperti: WBM (Wilayah Bebas Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani)
5. Dari sisi pengawasan, masih belum optimal pengimplementasian SPIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.

4.2 Keuangan

Kinerja pembangunan daerah Kota Magelang diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2015-2020. Kinerja penyelenggaraan

urusan Keuangan pada fungsi penunjang pemerintahan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 9 indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	REALISASI INDIKATOR TAHUN					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	80%	53,53%	74,36%	75,24%	76,18%	77,91%	103,88%	ST
		Barang Milik Daerah yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST
		Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	97,83%	100%	96,55%	100%	100%	100,00%	ST
		Pelaporan Tahunan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	97,83%	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST
2.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	10,21%	18,02%	6,01%	6,99%	9,49%	6,28%	55,20%	R
		Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	ST
3	Program Peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	12%	11,79%	13,36%	13,72%	14,78%	10,42%	85,79%	T
		Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	2,91%	3,02%	2,67%	2,26%	2,54%	1,83%	59,01%	R
4	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusda	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	2,59%	na	na	3,48%	3,33%	1,45%	55,92%	R

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2020

Lima indikator dari sembilan indikator Fungsi Penunjang Pemerintah Keuangan memiliki capaian kinerja indikator Sangat Tinggi (ST) terhadap target RPJMD, 1 (satu) indikator memiliki capaian Tinggi (T) dan ada 3 (tiga) indikator dengan capaian indikator kinerja berstatus Rendah (R). Indikator dengan capaian tinggi adalah Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, sedangkan indikator dengan capaian rendah yaitu prosentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.

Apabila dilihat dari tren prosentase pertumbuhan PAD, memang mengalami naik dan turun. Pada Tahun 2016, pertumbuhan PAD mencapai 18,02%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut ada penggalan potensi pajak dan penagihan terhadap potensi pajak yang baru atau yang belum ada pada tahun sebelumnya. Sedangkan tren indikator prosentase pertumbuhan PAD pada tahun berikutnya memang jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016, namun dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan. Peningkatan indikator ini pada tahun 2019 sebesar 2,50% dari tahun sebelumnya dan belum bisa

mencapai target yang ditetapkan sebesar 11,37%. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan realisasi indikator ini yaitu menjadi 6,28%. Penurunan yang dialami tahun 2020, apabila dilihat dari tingkat potensi PAD pada tahun berkenaan, realisasinya masih melebihi potensi. Berikut data realisasi PAD dari tahun 2016 – 2020:

Tabel 4.3
Realisasi PAD terhadap Potensi PAD pada Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Potensi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kinerja Realisasi PAD terhadap Potensi PAD
2016	269.616.256.588,-	220.217.864.000,-	81.68%
2017	297.261.794.010,-	233.392.755.573,-	78.51%
2018	297.261.794.010,-	249.873.268.826,-	84.06%
2019	240.276.687.120,-	273.534.038.858,-	113,84%
2020	259.654.903.000,-	290.427.994.347,-	111,85%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Magelang TA. 2010-2020, BPKAD Kota Magelang

Indikator prosentase retribusi daerah terhadap PAD tidak mampu mencapai target di tahun 2020. Hal ini tidak jauh berbeda dari indikator prosentase pertumbuhan PAD, karena keduanya sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah secara umum.

Indikator selanjutnya dengan status kinerja Rendah adalah Rasio Bagi Hasil Laba BUMD terhadap PAD. Pandemi COVID 19 sangat mempengaruhi omzet dari BUMD yang ada di Kota Magelang. PDOW Taman Kyai Langgeng sempat menutup kunjungan wisatawan selama beberapa bulan sejak terjadinya pandemi dan mengurangi jumlah pengunjung di bulan berikutnya hingga saat ini. PDAM selama masa pandemi mengurangi tarif pelanggan. PD Percetakan dan PD Perbengkelan mengalami penurunan omzet karena terjadi refocusing anggaran pada OPD. Sedangkan PD BPR Kota Magelang dan PD BKK Kota Magelang mengalami penurunan omzet karena lesunya sektor ekonomi. Gambaran perkembangan bagi hasil laba BUMD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Perkembangan Bagian Laba atas Penyertaan Modal
Pada BUMD dan Perusahaan Milik Daerah pada Tahun 2016-2020

NO	Keterangan	Th 2016	Th 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
1	PDAM	741,590,000	1,172,684,300	1,805,182,100	1,954,707,220	2,047,375,408
2	PDOW TKL	1,262,731,250	1,408,272,250	1,385,255,500	1,528,439,114	-
3	PD PERCETAKAN	-	-	21,725,331	-	-
4	PD PERBENGKELAN	24,864,400	43,662,300	57,243,000	71,037,461	85,812,500
5	PD BPR BANK MGL	1,642,152,600	1,774,402,300	2,005,786,372	1,779,845,791	1,842,800,926
6	PD BPR BKK KOTA MGL	49,187,850	135,221,742	171,208,195	187,600,899	230,196,070
	JUMLAH	3,720,526,100	4,534,242,892	5,446,400,498	5,521,630,485	4,206,184,904

sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kota Magelang

Rendahnya kinerja dari ketiga indikator tersebut dikarenakan pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal karena adanya pandemic virus Covid-19. Sektor jasa, seperti hotel dan restoran, serta sektor pariwisata yang menjadi andalan pemasukan pendapatan daerah menjadi sepi bahkan ada beberapa yang tutup karena dampak dari pandemi. Hal ini menyebabkan pendapatan dari sektor jasa dan pariwisata mengalami penurunan.

Selain itu, dimungkinkan Pemerintah Kota Magelang mentargetkan pendapatan yang cukup tinggi tanpa memperhatikan penurunan potensi pendapatan pada saat musim pandemi. Pemerintah daerah terlalu optimistis dalam membuat target pendapatan walaupun telah dikoreksi karena terjadi pandemi namun angka koreksi tersebut masih terlalu tinggi pada masa pandemi.

Upaya penguatan pembangunan di bidang ekonomi termasuk penciptaan iklim investasi yang kondusif dan upaya penanggulangan dampak pandemi secara masif diharapkan akan berdampak pada kenaikan PAD Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang harus segera melakukan berbagai strategi percepatan realisasi pendapatan daerah. Misalnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat sehingga target ketiga indikator tersebut dapat tercapai di akhir periode RPJMD.

Adapun Kendala yang dihadapi adalah:

1. Belum terpenuhinya kualitas dokumen penganggaran

Penyusunan dokumen penganggaran dianggap berkualitas ketika memenuhi asas tepat waktu dan konsisten. Namun masih ada dokumen yang belum tepat waktu penyampaian ke DPRD dan belum dapat memenuhi asas konsisten.

2. Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Kota Magelang

Kurang efektifnya proses penatausahaan dan penyajian LKPD disebabkan OPD belum memiliki pemahaman yang sama mengenai standar penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang. Hal ini akan menyebabkan adanya potensi penumpukan pertanggungjawaban di akhir tahun dan adanya potensi temuan atau rekomendasi dari BPK dikarenakan penyajian LKPD kurang sesuai dengan Standar Akuntan Pemerintahan.

3. Kurang optimalnya penerimaan PAD

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait belum optimalnya penerimaan PAD:

- Masih ada kesenjangan antara potensi Wajib Pajak (WP) pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan deviasi atas penerimaan pajak. Salah satu contoh, pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 masih terdapat 25,65% WP yang memiliki objek pajak namun belum patuh memenuhi kewajibannya. Prosentase pada tahun 2020 ini lebih besar daripada tahun 2019 yaitu sebesar 23.24%. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	POTENSI		REALISASI		DEVIASI		CAPAIAN	
		JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI	JUMLAH OP	NILAI
1	2017	36.325	6.425.009.761	27.723	6.257.673.488	8.512	167.336.273	76.32%	97.40%
2	2018	36.622	6.510.120.494	28.314	6.361.870.161	8.308	148.250.333	77.31%	97.72%
3	2019	36.445	7024.484.179	27.976	6.686.654.782	8.469	337.829.397	76.76%	95.19%
4	2020	36.776	7.170.232.320	27.343	6.372.902.635	9.433	797.329.685	74.35%	88.88%

Sumber : BPKAD Kota Magelang, 2020

- Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah).
 - Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga sering ditemukan adanya tindakan ilegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD.
 - Kurang optimalnya penarikan pajak, retribusi serta sumber-sumber PAD yang lain dikarenakan dampak pandemic Covid-19.
4. Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini membawa pengaruh pada berkurangnya PAD yang bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Urusan Keuangan di atas berimplikasi pada beberapa hal ke depannya. Beberapa indikator masih perlu diupayakan pencapaiannya. Implikasi pencapaian tersebut adalah:

1. Melaksanakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dengan mematuhi dari setiap proses penganggaran dan memberikan sosialisasi kepada OPD untuk menjaga konsistensi dokumen penganggaran.
2. Melaksanakan inovasi dan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas proses penatausahaan dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Magelang.
3. Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak.
4. Melakukan inovasi-inovasi agar potensi pungutan pajak dan retribusi masih tetap bisa dilaksanakan dengan optimal terutama pada masa pandemi. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak (WP) dan petugas merasa aman, nyaman serta merasakan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
5. Memberikan relaksasi baik dari sisi besaran maupun waktu jatuh tempo pajak agar wajib pajak dan UMKM dapat konsentrasi untuk memulihkan usaha mereka
6. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring baik dengan menggunakan TMD (Tax Monitoring Device) seperti penggunaan Tapping Box pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menambah penggunaan TMD ke objek pajak yang potensial namun belum dipasang mesin TMD
7. Melaksanakan inovasi dan sosialisasi dalam rangka agar optimalisasi administrasi aset daerah dapat terlaksana.

4.3 Perencanaan Pembangunan

Kinerja fungsi penunjang urusan perencanaan pada tahun 2016-2020, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 - 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	99,04%	99,04%	ST
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	65.00%	70.22%	75.14%	84.55%	12,69%	14,10%	SR
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	70.00%	74.00%	76.00%	88.71%	74,32%	87,44%	T
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	35.00%	36.00%	44.44%	45.24%	67%	121.82%	ST
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	75.00%	76.00%	80.00%	81.48%	82,39%	96,93%	ST
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	2.00	2.00	3.00	#N/A	0%	0,00%	SR
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95%	60.00%	90.00%	85.71%	85.71%	60,15%	60,15%	R
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%	0,00%	SR

Dari sebelas indikator kinerja urusan perencanaan, terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target 2020 yang berimbas pada capaian kinerja indikator terhadap target RPJMD tahun 2021. Sedangkan tujuh indikator lainnya tercapai tinggi dan sangat tinggi. Capaian indikator Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir sangat rendah selain disebabkan oleh refocusing akibat pandemi Covid juga karena banyak usulan masyarakat yang telah terakomodir melalui musrenbang. Selain itu, banyak pokok pikiran yang belum masuk kriteria atau masuk prioritas sehingga belum bisa diakomodir.

Untuk indikator Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti dan cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan tidak dapat dilaksanakan di 2020 karena refocusing. Sedangkan capaian terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan tidak dapat mencapai target dikarenakan beberapa data terkait tabel input output, analisis ketimpangan wilayah dan profil tidak terlaksana.

4.4 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan 5 (lima) program dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi S1	49%	49,71	45,10	45,98	48,00	48,68	99,39%	ST
		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi S2	10%	9,05%	8,71%	9,60	9,42	10,01	100,10%	ST
		Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD	100%	101%	100%	100%	96,44%	100%	100%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d.2021	Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK	46%	45,45%	45.45%	54.55%	54.55%	59.09%	128,46%	ST
		Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	71.43%	100.00%	100.00%	60.00%	57.14%	57,14%	R
		Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	66.67%	100.00%	100.00%	62,50	80,00	1.600%	ST
		Persentase ASN yang dijatuhi hukuman	0,01%	0,00	0,20%	0.14%	0.07%	0.15%	-1.300%	SR
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	98%	100.00%	97.78%	97.83%	98.25%	97.81%	99.8%	ST
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,18%	0.00%	0.26%	0.28%	0.28%	0.19%	105.5%	ST
3	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	98%	84.26%	142.66%	125.56%	83.00%	166.67%	170%	ST
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	100%	69.77%	100.00%	100.00%	97.37%	0.00%	0%	SR
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan	100%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0%	SR
		Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional	90%	78.95%	175.00%	102.86%	125.00%	100.00%	111.1%	ST
		Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter	97%	96.61%	96.15%	121.88%	68.93%	93.33%	96.2%	ST
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan finger print	100%	0.00%	100.00%	100.00%	93.79%	100.00%	100%	ST
6	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	92%	0.02%	78.14%	15.39%	16.88%	97.05%	105.49%	ST

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2020

Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2020 tidak seluruhnya dapat mencapai target. Dari 16 indikator yang mendukung 5 program, terdapat 12 indikator yang sudah mencapai atau melampaui target dan terdapat 4 indikator yang tidak mencapai target. Dari 4 (empat) indikator tersebut, 1 (satu) termasuk kategori rendah dan 3

(tiga) sangat rendah. Indikator yang kinerjanya jauh melampaui target yaitu presentase penanganan pelanggaran disiplin ASN dengan capaian 1.600%. Faktor utama penyebab dari capaian indikator ini karena adanya perubahan berkurangnya jumlah ASN dalam jumlah besar di Kota Magelang, dimana guru SMA dan SMK sekarang menjadi ASN Provinsi, hal itu menyebabkan perubahan jumlah perhitungan sehingga target menjadi tidak relevan lagi.

Namun demikian terdapat pula indikator yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan harapan (masuk kategori rendah hingga sangat rendah), antara lain sebagai berikut:

1. Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural tidak dapat mencapai target, hal itu diakibatkan oleh penambahan JPT kosong karena pejabat yang pension dan tentunya karena pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi kebijakan Kepala Daerah, sehingga menjadi sulit diperkirakan. Khusus untuk tahun 2020 terdapat ketentuan/peraturan dalam Pilkada yang tidak diperkenankan melantik pejabat bulan sebelum dan bulan setelah pelantikan KDH baru.
2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sebesar 0%, hal itu karena adanya pandemi covid19 yang menyebabkan pemda harus melakukan refocusing anggaran untuk pos diklat ini, selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak menyelenggarakan kegiatan Diklat Kepemimpinan.
3. Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan yaitu masing masing sebesar 0%, sebab memang tidak dianggarkan karena proses pengadaan CPNS belum selesai sehingga belum ada pengangkatan CPNS baru, sehingga menyebabkan belum dapat mengikuti atau menyelenggarakan Diklat Prajabatan.
4. Indikator persentase ASN yang diatuhi hukuman juga tidak sesuai harapan, ini sebenarnya juga berkaitan dengan penjelasan persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN, hal itu terjadi karena adanya perubahan secara ekstrim jumlah pembagi pada indikatornya pada periode RPJMD berjalan yaitu jumlah ASN. Pada saat awal RPJM tahun 2016 yaitu pada saat penetapan indikator ini, jumlah ASN Kota Magelang hampir 4000 (empat ribu) orang, sedangkan pada tahun 2017 ada kebijakan pusat yang menyebabkan Guru SMA, SMK dan beberapa fungsional menjadi kewenangan provinsi sehingga mengurangi jumlah ASN Kota Magelang menjadi hampir 2.800an orang. Adapun pada tahun 2020 jumlah ASN di Kota Magelang menurun lagi menjadi sekitar 2.600an, sehingga semakin berpengaruh pada presentase yang menjadi besar (slope negatif) dan membuat target tidak tercapai.

Sama dengan kondisi yang diakibatkan pada realisasi capaian kinerja pada tahun 2020, hasil evaluasi kinerja terhadap RPJMD terdapat 12 indikator yang capaiannya sangat tinggi dan diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD dan 4 indikator yang mungkin tidak tercapai. Sama dengan penyebab sebelumnya tidak tercapainya indikator dimaksud dikarenakan berkurangnya jumlah ASN dan optimisnya target pencapaian RPJMD.

4.5 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan melibatkan 9 (sembilan) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan target dan realisasi capaian tahun 2019 nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJM s.d.2021	Capaian Tahun					Kinerja RKPD Th.2020 Thd Target RPJMD	
				2016	2017	2018	2019	2020	Kinerja	Status
1.	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas	23%	10,50%	38,46%	36,00%	36,22%	34,15%	148,46%	ST
		Persentase krenova OPD yang berkualitas	12%	2,17%	25,58%	8,57%	12,86%	14,29%	119,05%	ST
2	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil riset/kajian yang ditindaklanjuti	50%	26,67%	33,33%	46,67%	42,31%	42,11%	84,21%	T
3	Program Pengembangan dan Penerapan Ipte9	Cakupan Pengembangan IPTEK	20%	7,50%	80,00%	14,45%	15,16%	12,59%	62,96%	R
4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	20%	7,00%	37,60%	33,85%	48,15%	55,23%	276,15%	ST
5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Cakupan publikasi hasil hasil penelitian	80%	60,00%	50,00%	40,00%	55,00%	75%	93,75%	ST
6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	Cakupan pembinaan hilirisasi produk teknologi dan Inovasi	15%	0,00	N/A	5,00%	10,00%	15%	100%	ST
7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	Persentase produk teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI	15%	8,30%	13,04%	32,00%	21,74%	4,35%	28,99%	SR
8	Program Penguatan Inovasi Daerah	Cakupan Penguatan SIDA	75%	30,00%	45,00%	53,33%	56,67%	63,33%	84,44%	T
9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jaringan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan peningkatan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	75%	30,00%	46,935	57,865	61,65%	70,87%	94,49%	ST

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2020

Memperhatikan hasil capaian tahun 2020 terhadap target tahun 2020, ada 1 indikator yang berkinerja Sedang dan 1 indikator berkinerja Sangat Rendah. Jika disandingkan dengan target RPJMD, ada 1 indikator berkinerja Rendah dan 1 indikator berkinerja Sangat Rendah. Capaian ini menurun dibandingkan hasil 2019, dikarenakan adanya pandemi yang berakibat tidak dilaksanakannya beberapa komponen indikator di tahun 2020, serta menurunnya partisipasi Balitbang pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Nasional, dikarenakan dibatalkannya acara-acara tersebut. Perlu beberapa upaya inovatif untuk dapat meningkatkan kinerja yang masih Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah ini, dalam mengantisipasi situasi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Untuk indikator-indikator yang berstatus Tinggi dan Sangat Tinggi, ini dikarenakan Balitbang sudah memiliki rintisan Jurnal Ilmiah, serta kegiatan-kegiatan yang menjembatani proses invensi ke tahap inovasi dan diseminasi. Tingginya pencapaian hasil riset juga dikarenakan Pemerintah Kota Magelang meminta kepada para perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang untuk mewajibkan mahasiswanya menyerahkan hasil tulisan ilmiahnya (Skripsi / Thesis / Disertasi) kepada

Balitbang. Peneliti / mahasiswa dari perguruan tinggi di luar Kota Magelang yang mengadakan riset dengan lokus Kota Magelang juga wajib menyerahkan karya ilmiahnya.

4.6 Pengawasan

Kinerja urusan Pengawasan diukur melalui 15 indikator, dengan capaian sampai dengan tahun 2020 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Capaian Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	87%	50,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	114,94%	ST
		Persentase aparat SPIP aktif	80%	32,60%	51,72%	55,17%	75,86%	89,66%	112,07%	ST
		Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	90%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,11%	ST
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3	2	3	3	3	Level 3	100,00%	ST
		Persentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	80%	46,15%	53,13%	100,00%	95,00%	100,00%	125,00%	ST
		Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	85%	100,00%	53,13%	100,00%	100,00%	100,00%	125%	ST
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan pencapaian indikator kinerja daerah	80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	125%	ST
		Perjanjian kinerja yang memenuhi kriteria standar	100%	100,00%	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJM s.d 2021	Capaian Tahun					Kinerja	Status
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	90%	26,08%	58,62%	58,62%	75,86%	86,21%	95,78%	ST
		Penurunan kasus temuan LKPD	0	4	-2	NA	1	1	80%	T
		Rasio laporan APBD, DAK, dan Bantuan Keuangan tepat waktu	100%	75,00%	89,65%	97,70%	97,70%	100,00%	100%	ST
		Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD	95%	0	78,19	79,66	80,82	82,47	86,81%	T
4	Program Sinergitas Penerapan SPI pada PD	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	55%	73,46%	73,60%	96,56%	76,64%	83,33%	151,50%	ST
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	5%	62,35%	0,02%	1,01%	0,05%	0,23%	195,40%	ST
		Persentase implementasi SPIP	100%	1,20%	51,72%	55,17%	75,86%	89,66%	89,68%	T

Sumber: Inspektorat Kota Magelang, Bagian Organisasi Kota Magelang, Bagian Administrasi Pembangunan Kota, Bappeda Kota Magelang 2020

Dari kelabelas indikator kinerja urusan pengawasan, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang capaiannya sangat tinggi, dan 2 (dua) tinggi.

Dalam penyelenggaraan urusan pengawasan terdapat indikator yang kinerjanya jauh melampaui target (kinerja realisasi 2020 $\geq$ 150% target RPJMD), yaitu: **Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP** dengan kinerja realisasi di tahun 2020 sebesar 199.23%. Faktor pendorong capaian tersebut adalah isi arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 yaitu diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun kapabilitas APIP dapat ditingkatkan menjadi level 3.

Pada 2017 kapabilitas APIP Inspektorat Kota Magelang masih diposisi level 2 menuju level 3 yaitu pada Peran dan Layanan APIP sebagai Audit Ketaatan (Khususnya terhadap organisasi, Aset dan SDM). Pada Tahun 2019 paradigma tersebut bergeser setelah Inspektorat mencapai level 3 (*Integrated*) penuh, dimana peran dan layanan APIP ke arah **layanan konsultasi dan Audit kinerja / program evaluasi**. Paradigma baru berimplikasi pada praktik pengawasan yang harus mendasar pada perencanaan audit berbasis Risiko, dimana masing masing entitas diperiksa harus membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menggambarkan apa saja kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Dari hasil RTP tersebut maka pemeriksa Inspektorat Kota Magelang akan memilah kegiatan yang berisiko tinggi untuk dilakukan pengawasan. Sejak

tahun 2019, penilaian yang dilakukan berbasis resiko. sehingga anggaran yang lebih beresiko yang dikawal oleh Inspektorat. Tahun 2020, telah dilakukan pengawasan regular terhadap 16 entitas. Dan diperoleh hasil temuan Ketidakpatuhan UU (temuan finansial sebesar) Rp 30.641.150 dibagi total jumlah Anggaran pada 16 entitas sebesar Rp13.560.291.051 sehingga didapati capaian sebesar 0,23% yang jauh melampaui target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 30%.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa fungsi pembinaan dalam rangka layanan konsultasi (advisory) telah dilaksanakan dengan baik sehingga pembinaan terhadap pengelolaan anggaran pada ke 16 entitas yang diperiksa dapat dikategorikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibuktikan dengan semakin kecilnya temuan finansial (ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan).

Tabel 4.5
Capaian Indikator Kinerja Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP Tahun 2018-2020

No	Variabel	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah temuan finansial	Rp. 139.593.300	Rp. 227.233.508	Rp. 30.641.150
2	Jumlah anggaran belanja yg diperiksa	Rp. 13.855.738.039	Rp. 419.657.206.886	Rp. 13.560.291.051
	Prosentase	1,01%	0,05%	0,23%

Tabel diatas menunjukkan bahwa prosentase temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP sampai dengan tahun 2020 mencapai 0.23%. Untuk jumlah entitas yang akan diperiksa jika dibandingkan dengan tahun 2019 menurun, yaitu 50 entitas pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 16 entitas. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran berkaitan dengan pandemi Covid19. Hal itu terlihat dari jumlah anggaran belanja yang diperiksa semakin kecil.

Meskipun semua indikator sudah mencapai target, tetapi masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, agar kedepan diperoleh komposisi, fungsi dan APIP yang profesional, yaitu terkait dengan pemenuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana salah satu klausulnya menyatakan bahwasanya anggaran untuk urusan pengawasan diharapkan minimal 1% dari total APBD, sehingga dari ketercukupan anggaran tersebut diharapkan diperoleh suatu tingkatan atau struktur penyelenggaraan SPIP yang prima baik dari sisi kuantitas (mengacu pada Keputusan Kepala BPKP, Nomor KEP 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, maupun dari pemenuhan sisi kualitas yang diukur melalui tingkat maturitas SPIP. Terkait dengan kualitas APIP diperlukan standar kompetensi auditor internal dikelompokkan dalam tiga area utama yaitu kompetensi umum, perilaku, dan kemampuan teknis serta dua area tambahan yaitu pengetahuan, dan perangkat dan teknik audit, mengingat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* atau untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran melalui reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.